

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka

ROMBONGAN JURNALIS HILANG SAAT LIPUT GAK

PEMKOT CILEGON ANTISIPASI BENCANA DI DEPAN MATA

BANTEN, BANPOS – Sebanyak tujuh orang yang disebut merupakan rombongan jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK), Selasa (8/9). Sementara Pemkot Cilegon Pemerintah Kota Cilegon mulai memperkuat mitigasi dan layanan kesehatan karena menilai bencana bisa terjadi di depan mata.

Informasi hilangnya rombongan jurnalis tersebut
BACA **ROMBONGAN HAL** - 9



Personel gabungan pencarian 7 Jurnalis yang hilang dalam perjalanan peliputan menuju GAK.

ISTIMEWA



Suasana perdagangan di TPI Labuan, sepi pembeli.

ATIVITAS GAK GANGGU PERIKANAN, **PARIWISATA** **JALAN TERUS**

BANTEN, BANPOS - Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) menurunkan transaksi sektor perikanan. Namun di sisi lain kondisi itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap

BACA **AKTIVITAS HAL** - 9

PJJ GAK Bikin Nostalgia Zaman Covid

Oleh : **Muhamad Wahyu**

ADA yang berbeda dari suasana belajar Gia, siswi kelas IV sekolah dasar, pada Senin pagi itu. Tak ada seragam yang dikenakan untuk berangkat ke sekolah, tak ada suara langkah kaki menuju ruang kelas, dan tak ada riuh teman-

teman sebaya. Gia justru duduk di rumah sambil menatap layar telepon genggam. Di hadapannya bukan buku pelajaran semata, melainkan layar yang menampilkan guru dan materi pembelajaran secara daring.

Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK)
BACA **PJJ GAK HAL** - 9

MUHAMAD WAHYU/BANTEN POS



61 SPPG DI BANTEN SUSPEND

257.681 DI KOTA SERANG
TERHENTI AKIBAT GAK

LEBAK, BANPOS - Sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten terkena sanksi penghentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional. Alasan sanksi tersebut diberikan salah satunya karena masalah administrasi. Sementara,
BACA **61 SPPG HAL** - 9

PEMKAB KEJAR DUKUNGAN PUSAT
UNTUK SEKTOR PERTANIAN

03

KEJAKSAAN SERIUS TANGANI
DUGAAN ANGGARAN DINKES

04

GUBERNUR DESAK
KEPASTIAN LSD

07

BERDAYAKAN
KELOMPOK WANITA

08



DZIKI OKTOMAUJIYADI/BANTEN POS

PREDIKSI EL NINO.

Pengendara melintas di samping pohon yang meranggas akibat musim kemarau di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Sempu, Kota Serang, Selasa (8/9). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.

DAMPAK EL-NINO **KIAN MELUAS**

SERANG, BANPOS - Musim kemarau yang dikenal dengan El Nino Godzilla terus menggerus lahan pertanian di sejumlah wilayah Banten.
BACA **DAMPAK HAL** - 9

Vox Populi



Muhamad Elfan Setiawan
WARTAWAN BANTEN POS

Merawat Ingatan September Hitam

SETIAP Kamis, mereka berdiri. Tidak selalu dengan suara keras, tidak pula dengan kerumunan yang besar. Sebagian hanya membawa payung hitam, poster, atau selempang foto orang yang hingga hari ini belum menemukan keadilan.
BACA **VOX POPULI HAL** - 9



POLITIK & HUKUM

Anak Korban Kekerasan Masih Enggan Melapor Langsung

SERANG, BANPOS – Anak korban kekerasan masih menghadapi sejumlah hambatan untuk berani melaporkan kasus yang dialaminya. Rasa takut, malu, minimnya pemahaman mengenai hak anak, hingga ancaman dari pelaku maupun lingkungan menjadi faktor yang membuat korban tidak selalu berani menyampaikan kasus secara langsung.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Kota Serang Aulia Esa Rahman mengatakan, setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan anak enggan berbicara atau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Pertama, masih terbatasnya pemahaman anak mengenai hak-haknya serta mekanisme perlindungan dan pelaporan. Kedua, adanya rasa takut dan malu karena khawatir dimarahi, dikucilkan, atau mendapat penilaian negatif dari lingkungan. Ketiga, adanya ancaman dari pelaku, keluarga, maupun lingkungan sekitar.

Menurut Esa, kondisi tersebut

menunjukkan pentingnya menyediakan akses pelaporan yang mudah dan aman bagi anak. Pelaporan juga tidak harus selalu dilakukan dengan mendatangi lembaga layanan secara langsung. Guru, tenaga kesehatan, teman, maupun lembaga yang dipercaya anak dapat menjadi penghubung untuk menyampaikan kasus kepada pihak yang memiliki kewenangan melakukan penanganan. “Edukasi mengenai perlindungan anak termasuk prosedur pelaporan harus terus dilakukan. Ini penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak anak dan diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran terhadap hak anak,” kata Esa kepada BANPOS, Selasa (8/9).

Esa menambahkan, kemudahan akses pelaporan perlu dibarengi dengan edukasi yang berkelanjutan. Edukasi mengenai hak anak dan prosedur pelaporan perlu dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat agar anak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan ketika mengalami



kekerasan. “Kami berharap pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi anak untuk berbicara dan melaporkan kekerasan tanpa takut mendapat stigma maupun tekanan,” ucapnya.

Pentingnya kanal pelaporan yang mudah diakses juga tercermin dari data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banten.

Lembaga tersebut mencatat mayoritas pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak disampaikan melalui kanal tidak langsung. Secara keseluruhan, terdapat 124 dari 169 pengaduan atau sekitar 73 persen yang disampaikan melalui kanal tidak langsung. Sementara laporan yang diterima secara langsung berjumlah 45 kasus atau sekitar 27 persen.

Purwadi mengatakan, masyarakat kini memiliki sejumlah pilihan untuk menyampaikan pengaduan. Selain SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), masyarakat dapat menghubungi hotline UPTD PPA Banten maupun layanan UPTD PPA di kabupaten dan kota.

Pengaduan yang masuk melalui kanal pusat juga dapat diteruskan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai lokasi dan kebutuhan korban. “Kalau menurut saya masyarakat kita sekarang sudah mulai berani untuk speak up terhadap kasus atau yang sedang dialaminya,” ujar Purwadi.

Menurutnya, kanal tidak langsung memberikan kemudahan bagi korban maupun keluarga untuk menyampaikan laporan tanpa harus datang ke kantor layanan. Mekanisme tersebut juga memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan di luar jam pelayanan kantor. “Yang penting masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi kasusnya itu bisa tersampaikan kepada kita,” katanya.

Purwadi berharap semakin banyak pilihan kanal pengaduan dapat membuat masyarakat tidak lagi ragu melaporkan kasus kekerasan. Menurutnya, laporan langsung maupun tidak langsung sama-sama dapat digunakan selama informasi mengenai kasus dapat diterima dan ditindaklanjuti.(MYU/PAY)

RUANG PUBLIK

OLEH:

Malik Fatoni, S.H.I.,
M.Si., CPM., Adv.
Pengurus PW PGM
Indonesia Banten



ADA satu pertanyaan yang sesungguhnya sudah waktunya ditinggalkan dalam diskursus pendidikan Indonesia: Apakah madrasah mampu bersaing dengan sekolah?

Pertanyaan itu lahir dari cara pandang lama yang menempatkan sekolah sebagai representasi pendidikan umum, sementara madrasah sering ditempatkan dalam posisi ‘periferal—identik dengan pendidikan agama dan dianggap belum sepenuhnya kompetitif dalam sains, teknologi dan prestasi akademik. Padahal, realitas pendidikan telah berubah. Madrasah tidak sedang meminta belas kasihan untuk dianggap setara. Madrasah sedang membuktikan bahwa dirinya memang mampu berdiri sejajar.

Momentum Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 2026 menjadi salah satu panggung penting untuk membuktikan tesis tersebut. OMI 2026 digelar secara serentak berbasis Computer-Based Test pada 7–9 September 2026. Kementerian Agama mencatat sekitar 230 ribu peserta mendaftar, meningkat 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sekitar 13 ribu peserta berasal dari sekolah umum.

Angka tersebut bukan sekadar

statistik. Ia merupakan pesan sosial bahwa kompetisi pendidikan semakin terbuka dan batas antara “sekolah” dan “madrasah” semakin tidak relevan ketika yang dipertarungkan adalah kompetensi dan mutu peserta didik.

OMI Bukan Sekadar Olimpiade

Kita perlu membaca OMI lebih jauh daripada sekadar kompetisi mencari juara. OMI adalah instrumen untuk mengukur sejauh mana madrasah mampu membangun budaya akademik, mengembangkan talenta peserta didik dan menyiapkan generasi yang memiliki daya saing.

Kementerian Agama sendiri menempatkan OMI sebagai bagian dari upaya pengembangan serta penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus peningkatan mutu dan daya saing madrasah. Pada OMI bidang sains dan riset tahun sebelumnya, misalnya, proses kompetisi telah melibatkan tahapan seleksi berjenjang dan penilaian oleh ahli akademik. Dengan demikian, OMI seharusnya tidak dipahami sebagai kegiatan tambahan dalam kalender pendidikan.

OMI adalah bagian dari ekosistem peningkatan mutu. Di dalamnya terdapat proses seleksi, pembinaan, kompetisi, evaluasi, pengembangan talenta dan pembentukan mental berprestasi. Karena itu, ketika seorang siswa madrasah duduk mengerjakan soal olimpiade, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya kemampuan siswa tersebut. Di belakangnya ada kualitas guru, pola pembelajaran, budaya akademik, kepemimpinan kepala madrasah, dukungan orang tua, fasilitas belajar dan kebijakan pendidikan. Satu peserta adalah representasi dari sebuah ekosistem. Mematahkan Stigma dengan Prestasi.

Selama terlalu lama, madrasah terkandung harus bekerja dua kali. **Pertama**, mendidik peserta

didik.

Kedua, membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu.

Di sinilah persoalan stigma menjadi penting. Madrasah tidak boleh terus-menerus didefinisikan berdasarkan persepsi masa lalu. Madrasah harus dinilai berdasarkan capaian mutunya hari ini. Jika peserta didik madrasah mampu berkompetisi dalam matematika, sains, teknologi, riset, ekonomi, bahasa, sosial-humaniora dan berbagai bidang lainnya, maka tidak ada alasan akademis untuk menempatkan madrasah sebagai pendidikan kelas dua.

Faktanya, pelaksanaan OMI 2026 di berbagai daerah menunjukkan bahwa kompetisi tidak hanya diikuti madrasah, tetapi juga sekolah umum. Di Kota Langsa, misalnya, peserta OMI berasal dari SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan pondok pesantren.

Ini menarik. Sebab OMI tidak lagi sekadar menjadi panggung eksklusif madrasah. Ia mulai menjadi ruang kompetisi lintas satuan pendidikan. Maka, marwah madrasah tidak dibangun dengan klaim.

Marwah dibangun dengan kemampuan. Dan kemampuan dibuktikan dengan prestasi. Mutu Tidak Boleh Berhenti pada Medali. Namun kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai OMI hanya melahirkan euforia medali, piala dan seremoni. Sebab medali adalah output, sedangkan mutu adalah sistem.

Madrasah yang bermutu bukan hanya madrasah yang menghasilkan juara. Madrasah bermutu adalah madrasah yang mampu membangun sistem pembelajaran yang membuat prestasi dapat lahir secara berkelanjutan.

Karena itu, setelah OMI selesai, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Peserta yang berhasil harus mendapatkan pembinaan lanjutan. Guru pembimbing perlu

memperoleh penguatan kompetensi.

Madrasah perlu membangun klub sains, riset, literasi dan talenta. Laboratorium harus hidup. Perpustakaan harus menjadi pusat pengetahuan. Teknologi digital harus menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan yang paling penting, budaya bertanya, meneliti, mencoba, gagal, memperbaiki dan menemukan harus tumbuh dalam keseharian peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, OMI tidak berhenti sebagai event, tetapi berubah menjadi movement—gerakan peningkatan mutu madrasah. Jangan Lagi Mempertentangkan Sekolah dan Madrasah.

Pendidikan Indonesia seharusnya berhenti mempertentangkan sekolah dan madrasah. Keduanya bukan dua kutub yang harus saling menegaskan. Yang harus dibangun adalah kompetisi sehat berdasarkan standar mutu.

Siswa sekolah berprestasi? Kita apresiasi. Siswa madrasah berprestasi? Kita apresiasi. Sebab keduanya adalah anak bangsa.

Persoalan yang lebih mendasar justru bagaimana negara memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Kesetaraan pendidikan bukan berarti semua lembaga harus identik. Kesetaraan berarti setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Karena itu, ketika madrasah dituntut bersaing pada tingkat nasional bahkan global, maka negara juga harus memastikan tersedianya ekosistem yang mendukung: guru berkualitas, sarana-prasarana memadai, akses teknologi, pembiayaan yang proporsional, laboratorium, penguatan riset dan sistem pembinaan talenta. Tidak adil jika negara menuntut prestasi tinggi tetapi membiarkan ekosistemnya berjalan dengan keterbatasan.

OMI dan Marwah Madrasah: Membuktikan Mutu, Mematahkan Stigma

Dari OMI Menuju Transformasi Mutu

OMI 7–9 September 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Ia harus menjadi momentum evaluasi nasional. Setiap madrasah perlu bertanya: Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum kita miliki? Mengapa siswa kita belum berprestasi? Bagaimana kualitas guru kita? Seberapa kuat budaya riset kita? Seberapa jauh teknologi telah digunakan untuk pembelajaran?

Dan yang paling penting: Apakah kita sudah memberikan ruang terbaik bagi setiap anak untuk menemukan potensinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak medali yang diperoleh. Sebab pendidikan bermutu bukan hanya tentang menemukan anak-anak terbaik. Pendidikan bermutu adalah tentang membuat sebanyak mungkin anak menjadi terbaik sesuai potensinya.

Branding Madrasah Harus Berbasis Bukti

Di tengah kompetisi pendidikan yang semakin terbuka, madrasah juga perlu mengubah strategi branding. Jangan membangun citra hanya dengan slogan. Jangan mengatakan madrasah unggul hanya karena memasang kata “unggulan” di depan nama lembaga. Branding terbaik adalah bukti. Prestasi siswa adalah bukti. Kualitas guru adalah bukti. Budaya akademik adalah bukti. Kedisiplinan adalah bukti. Karakter peserta didik adalah bukti. Lulusan yang berhasil adalah bukti. Dan kemampuan madrasah beradaptasi dengan perubahan zaman adalah bukti.

OMI memberikan kesempatan luar biasa untuk membangun narasi baru tersebut. Narasi bahwa madrasah bukan sekadar tempat belajar agama. Madrasah adalah tempat ilmu pengetahuan,

teknologi, karakter dan nilai-nilai kehidupan bertemu.

Di tengah era kecerdasan artifisial, disrupsi digital dan perubahan dunia kerja, pendidikan tidak cukup menghasilkan manusia yang hanya pintar. Kita membutuhkan manusia yang pintar sekaligus berakarakter; kompeten sekaligus berintegritas; menguasai teknologi tetapi memiliki kendali moral. Di titik inilah madrasah memiliki modal sosial dan kultural yang sangat kuat.

Marwah Madrasah adalah Marwah Pendidikan Indonesia

Akhirnya, membicarakan marwah madrasah sesungguhnya bukan hanya membicarakan kepentingan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Ini adalah bagian dari pembicaraan tentang masa depan pendidikan nasional. Madrasah adalah bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia. Karena itu, kemajuan madrasah adalah kemajuan pendidikan nasional. OMI 2026 memberi kita momentum untuk melihat madrasah dengan perspektif yang lebih jernih. Bukan dari stigma. Bukan dari stereotip. Bukan dari label. Tetapi dari kompetensi, prestasi dan mutu.

Maka sudah waktunya kita mengubah pertanyaan. Bukan lagi: “Apakah madrasah mampu bersaing dengan sekolah?” Tetapi: “Bagaimana negara memastikan madrasah dan sekolah sama-sama memiliki ekosistem terbaik untuk melahirkan generasi unggul Indonesia?” Sebab pada akhirnya, pendidikan tidak membutuhkan kasta. Pendidikan membutuhkan mutu. Dan madrasah tidak membutuhkan belas kasihan untuk dihargai. Madrasah membutuhkan kesempatan yang adil untuk membuktikan dirinya.

OMI adalah salah satu panggung pembuktian itu. Dari sana, sebuah pesan harus disampaikan dengan tegas: Madrasah tidak sedang mengejar pengakuan. Madrasah sedang membuktikan mutu. Dan ketika mutu telah berbicara, stigma semestinya tidak lagi memiliki tempat.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001

BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga |

JAWAB: Chandra Magga | REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi | REDAKTUR: Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi |

REPORTER: CH Widodo Haider, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardele | PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat | IKLAN: Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | FOTOGRAFER: Dziki Oktomauliyadi | PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadi |

ACCOUNTING: Ifroh Hardianti | ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurrohman | ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani | ADMINISTRASI: Nia Aryanti | PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	
Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	
SOSIAL/KELUARGA				
Hitam Putih (BW)	: Rp. 30.500/mm kolom			
Warna (FC)	: Rp. 54.500/mm kolom			

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

PANDEGLANG

Pemkab Kejar Dukungan Pusat untuk Sektor Pertanian

PANDEGLANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengusulkan sejumlah program penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan serta peningkatan jaringan irigasi hingga pengembangan lumbung pangan modern.

Usulan itu disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi dan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Dewi mengatakan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Pandeglang. Menurutnya, sektor pertanian memiliki posisi strategis karena ditopang potensi sumber daya alam serta masyarakat yang banyak menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor tersebut. "Bagi Pemkab Pandeglang, usulan

ini bukan semata-mata permohonan bantuan. Namun merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan masyarakat Kabupaten Pandeglang," kata Dewi.

Ia menjelaskan, kepada Kementan, Pemkab Pandeglang mengusulkan dukungan berupa benih tanaman pangan, alsintan, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi pertanian. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus membantu petani meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan.

Selain kepada Kementan, Pemkab Pandeglang juga mengajukan sejumlah program kepada Bapanas. Di antaranya dukungan infrastruktur ketersediaan pangan untuk pengembangan lumbung pangan modern, fasilitas Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengembangan kebun Beragam, Ber-

gizi Seimbang dan Aman (B2SA). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan hingga tingkat keluarga. "Kami sangat berharap Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bapanas dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor pertanian terpadu di Kabupaten Pandeglang," ujar Dewi.

Menurut dia, sinergi dengan pemerintah pusat akan memperkuat program pembangunan pertanian yang selama ini dijalankan Pemkab Pandeglang. Kolaborasi tersebut juga dinilai penting agar potensi pertanian daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dewi optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat dan potensi sumber daya pertanian yang dimiliki, Pandeglang dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap ketahanan pangan Banten dan nasional. "Kami yakin Pandeglang dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung



Bupati Pandeglang, Dewi Setiani saat menemui Sekjen Kementan, Suwandi.

ketahanan pangan, baik untuk Provinsi Banten maupun secara nasional," katanya.

Sementara itu, Sestama Bapanas Sarwo Edhy menyambut positif usulan Pemkab Pandeglang. Namun, ia meminta pemerintah daerah melengkapi setiap usulan dengan inventarisasi dan data ek-

sisting sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.

"Semua ajuan silakan diinventarisasi data eksisting, selanjutnya diusulkan. Nanti kami akan sesuaikan dengan anggaran. Jika memungkinkan bisa dari ABT, jika tidak bisa akan dianggarkan tahun 2027," kata Sarwo.

Respons serupa disampaikan Sekjen Kementan Suwandi. Ia meminta Pemkab Pandeglang segera menyampaikan usulan program untuk ditindaklanjuti kementerian. "Silakan diajukan, nanti akan kami tindaklanjuti apa yang menjadi ajuan dari Pemkab Pandeglang," ungkapnya.(DHE/PAY)

KOTA BADAK



Koramil 0101/Pandeglang Kawal Penyaluran Bantuan Pangan

SEBANYAK 965 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Babakan Kalang Anyar, Kecamatan Pandeglang, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan tersebut dipantau Babinsa Koramil 0101/Pandeglang Kodim 0601/Pandeglang untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Monitoring dilakukan Babinsa Kelurahan Babakan Kalang Anyar Peltu Asep Junaedi bersama pemerintah kelurahan dan petugas Bulog di halaman Kantor Kelurahan Babakan Kalang Anyar, Selasa (8/9). Asep mengatakan, pemantauan dilakukan sebagai bagian dari pembinaan wilayah sekaligus untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan kondusif. "Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan terhadap proses kedatangan dan pelayanan kepada masyarakat penerima ban-

tuan," kata Asep.

Menurutnya, Babinsa juga berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan petugas Bulog untuk mengantisipasi kendala selama proses penyaluran. Masyarakat penerima bantuan diminta mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan agar kegiatan berlangsung tertib. "Warga diminta untuk tetap tertib selama proses penyaluran, mengikuti arahan petugas, serta menjaga suasana tetap aman dan kondusif," ujarnya.

Asep menyampaikan, bantuan pangan beras merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya. "Diharapkan seluruh rangkaian penyaluran Program Bantuan Pangan Beras periode Juli hingga September 2026 bagi 965 KPM di Kelurahan Babakan Kalang Anyar dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Sinergi antara Babinsa, pemerintah kelurahan dan petugas Bulog diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan pangan yang tertib, lancar dan sesuai ketentuan.(DHE/PAY)

Polres Pandeglang Semprot Abu Vulkanik di Jalan

PANDEGLANG, BANPOS - Polres Pandeglang mengerahkan kendaraan Water Cannon untuk membersihkan abu vulkanik yang menutupi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pandeglang akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Penyemprotan dilakukan untuk mengurangi tumpukan abu sekaligus menjaga keamanan pengguna jalan.

KBO Polres Pandeglang AKP Abdul Rahman Taufik mengatakan, kendaraan taktis milik kepolisian tersebut dikerahkan untuk menyemprot sejumlah ruas jalan protokol yang dipenuhi abu vulkanik. "Penyemprotan dilakukan untuk mengurangi tumpukan abu, sekaligus untuk menjaga kondisi jalan agar tetap aman dan tidak membahayakan pengguna jalan," kata Abdul Rahman, Selasa (8/9).

Menurutnya, air bertekanan

tinggi dari Water Cannon digunakan untuk membasahi dan mendorong abu vulkanik agar tidak kembali beterbangan, terutama ketika ruas jalan dilintasi kendaraan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengurangi risiko terganggunya jarak pandang pengendara serta mencegah abu beterbangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. "Air bertekanan tinggi digunakan untuk membasahi dan mendorong abu vulkanik agar tidak kembali beterbangan. Terutama saat dilintasi oleh kendaraan," jelasnya.

Abdul Rahman menambahkan, pengerahan Water Cannon merupakan salah satu langkah kepolisian untuk mempercepat proses pembersihan jalan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman. Selain member-



Kendaraan Water Cannon Polres Pandeglang, saat melakukan penyemprotan jalan.

sihkan ruas jalan, petugas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas. Pengguna jalan diminta menggunakan masker dan pelindung mata, terutama ketika berada di luar rumah dan melintasi wilayah yang masih

terdampak abu vulkanik. "Selain penyemprotan, petugas mengimbau pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker serta mengenakan pelindung mata ketika beraktivitas di luar rumah," pungkasnya.(DHE/PAY)

Wamensos Minta Siswa Sekolah Rakyat Serius Kejar Cita-cita



Wamensos RI, Agus Jabo Priyono saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Kabupaten Pandeglang.

PANDEGLANG, BANPOS - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono meminta siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pandeglang memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Para siswa diminta disiplin, menaati aturan, serta bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mewujudkan cita-cita.

Pesan tersebut disampaikan Agus saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pandeglang, Selasa (8/9). Ia memotivasi para siswa agar tidak ragu mengejar profesi yang diimpikan

dengan kerja keras dan kesungguhan. "Sekolah ini dibuat oleh Bapak Presiden, supaya kalian bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Manfaatkan Sekolah Rakyat ini sebaik-baiknya. Kalian harus disiplin dan bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan," ujar Agus.

Ia mengatakan, setiap siswa memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita masing-masing. Karena itu, siswa yang ingin menjadi dokter, guru, maupun profesi lainnya harus berjuang melalui proses pendidikan. "Jika kalian ingin menjadi

dokter, berjuanglah untuk menjadi dokter. Jika kalian ingin menjadi guru, berjuanglah untuk menjadi guru," pesannya.

Agus juga mengingatkan seluruh siswa dan pengelola sekolah untuk menjaga lingkungan pendidikan tetap aman dan nyaman. Ia menegaskan tidak boleh terjadi perundungan, intoleransi maupun pelecehan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat. "Tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada intoleransi dan tidak boleh ada pelecehan seksual," tegasnya.

Menurut Agus, Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pemerintah pusat juga menanggung berbagai kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, termasuk kebutuhan makan. "Presiden ingin memuliakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Tugas kalian, anak-anak, hanya belajar di sini," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus turut mengapresiasi sinergi

Pemkab Pandeglang dengan pemerintah pusat sehingga program Sekolah Rakyat dapat hadir di daerah tersebut. Ia berharap seluruh siswa dapat mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjaga lingkungan sekolah.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial atas hadirnya program Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang. Dewi menegaskan Pemkab Pandeglang siap mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. "Kami siap mendukung program Asta Cita Pak Prabowo melalui Kementerian Sosial. Bersama-sama membahagiakan wong cilik. Sekolah Rakyat hadir untuk wong cilik," kata Dewi.

Ia menambahkan, Pemkab Pandeglang akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(DHE/PAY)

IKLAN LARIS

Info Iklan:
- 051334404392
- 057505531153

KEHILANGAN

KEHILANGAN BPKB MOTOR HONDA BEAT/ NC11B3C A/T TAHUN 2010, NOPOL B 6808 CQO AN. FERI KUSPARLIANTO JL. RAMA NO.26, RT004/010 KELURAHAN CIBODAS BARU KEC CIBODAS KOTA TANGERANG NO HP 0856-9792-9227

Telah hilang 1 (Satu) buah dokumen SHGB dengan Nomor SHGB 1896 atas

nama PT CAHAYA BAJA PRATAMA dengan NO SPPT 36.72.080.007.025-0014.0 dan luas kurang lebih seluas 9472 M2 (Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl.A Yani Kel.Sukmajaya Kec.Jombang, Kota Cilegon.

Barang/surat-surat penting tersebut di atas, diduga / diketahui hilang pada Hari Minggu 10 Mei 2026 sekira Pukul 09.30 Wib. Diperkirakan hilang Tercecer di PT CAHAYA BAJA PRATAMA di daerah wilayah hukum Polres Cilegon.

Atas kehilangan dokumen SHGB dengan Nomor SHGB 1896 tersebut telah dilaporkan oleh pelapor Nama: Victor Anthony, alamat: Apt. Mediterania GR 1 Twr A.15 A/K C/J RT 001/008 Kel/ Desa.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan Kab/Kota Jakarta Barat ke Polres Cilegon dengan Nomor: SKTLK/91/YAN.2.4.1.V/2026/SPKT II pada 16 Mei 2026.

Telah hilang Surat AJB atas nama SUNARNI Nomor : 470/2005 Lokasi Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang

Kota Tangerang

Telah hilang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5379 atas nama Tasmin Bin Pian, dengan luas tanah 244 m². Lokasi tanah di Jl. Poncol Indah Raya No. 9 RT 05/02, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

HILANG BPKB, R4 NO. POL: A-257-K NOKA: MHKF MR CEJ4K 001140 AN. PEMERINTAH DAERAH

HILANG BPKB, R4 NO POL: A-1473-KR HOKA: MHKM1CB4JEK 036217 AN. H. SUKRI BIN SUWARTA (ALM).

HILANG BPKB, R4 NO.POL: A-9236-KB HOKA: MHMF E 74 P5JK 184005 AN. Mahajana Cahaya Juwita

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE
www.banpos.co

EMAIL
iklanbantenpos@gmail.com

TWITTER
@bantenpos

INSTAGRAM
banten_pos

FACEBOOK
facebookbantenpos

YOUTUBE
Banpos Channel

LEBAK

KEJAKSAAN SERIUS TANGANI

DUGAAN ANGGARAN DINKES

Konsultan dan Pemilik Tempat Acara Bakal Dipanggil

LEBAK, BANPOS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak menegaskan, penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak masih berlangsung. Saat ini Kejari akan melakukan pemanggilan terhadap pihak konsultan serta pemilik tempat acara untuk dimin-tai keterangan atas kasus dugaan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebak, Agung Malik Rahman Hakim, mengungkap bahwa proses hukum atas perkara ini terus berjalan meski harus dilakukan secara maraton dengan penanganan kasus lainnya. Menurutnya, sejauh ini kesimpulan penyelidikan baru menyentuh tahap setengah jalan.

“Ya kita tetap guyur, masih berjalan ya kan. Kita juga kan nggak satu ya kan (perkara yang ditangani), jadi kita tiap minggu itu biasanya maraton. Belum, kita nanti belum di-ending ya. Jadi kesimpulannya masih setengah jalan,” kata Agung saat dikonfirmasi BANPOS pada Selasa (8/9).

Agung membeberkan, dalam waktu dekat pihaknya telah menjadwalkan klarifikasi terhadap satu lembaga yang berbasis di Jakarta. Keterangan dari lembaga tersebut beserta pihak pengelola lokasi kegiatan di Bandung dipandang krusial untuk menentukan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum (PMH) maupun penyelewengan anggaran.

“Nanti kita klarifikasi ada satu lembaga yang di Jakarta ya. Kalau itu sudah dapat sama tempat kegiatannya kita sudah dapatkan keterangan, mungkin kita bisa ambil kesimpulannya. Adakah di situ perbuatan melawan hukum atau penyelewengan atau apa pun itu. Kita jadwalkan mudah-mudahan bulan ini bisa kekejar,” tuturnya.

Dalam proses penyelidikan ini, Kejaksaan juga meluruskan simpang siur informasi mengenai besaran biaya kegiatan yang sempat

beredar di media. Agung menegaskan bahwa berdasarkan temuan sementara, biaya yang dikenakan per peserta adalah sebesar Rp5,5 juta bukan Rp15 juta.

Anggaran tersebut, lanjut Agung, bukan bersumber langsung dari pos anggaran Dinas Kesehatan, melainkan dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masing-masing Puskesmas sesuai dengan ketersediaan dana mereka.

“Itu ada media yang menulis Rp15 juta itu sebenarnya salah. Yang betul adalah per orang itu Rp5,5 juta. Nah, itu dapat paket fasilitas hotel dan lain sebagainya. Jadi dibebankan ke masing-masing BLUD, bukan

anggaran dinas. Ada yang ikut tiga orang, ada yang lima orang, sesuai anggaran mereka. Kita sudah dapat (datanya),” beber Agung.

Fokus penyelidikan kini mengarah pada kewajaran harga yang ditetapkan oleh pihak konsultan. Jaksa tengah meneliti apakah nilai Rp5,5 juta per orang tersebut masuk akal jika dibandingkan dengan fasilitas dan materi yang didapatkan oleh para peserta.

“Kita tinggal lihat harga-harga tersebut ditetapkan oleh konsultan kan. Itu wajarkah per orang dikenakan biaya sekian. Kita menuju klarifikasi data terkait wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, ya potensi (naik ke penyidikan) itu apa pun bisa. Tapi kita belum dapat itu,” tegasnya.

Disinggung mengenai target waktu penyelesaian, Agung mengaku berupaya menuntaskannya secepat mungkin. Meski memiliki keterbatasan personel di jajaran Pidsus, ia memastikan penanganan perkara tetap dilakukan secara profesional dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

“Karena kita banyak perkara, kita guyur saja, secepatnya lah. Karena saya cuma punya jaksa dua. Tapi soal SDM bukan mengeluh ya, tapi itu fakta. Kalau kami bicara fakta data sudah selesai di situ, nanti kita cari apakah ada penyimpangan atau penyelewengan,” pungkasnya. (TQS/RUS)

MULTATULI



Kolam Ikan budidaya nila merah milik BUMDes Raharja Desa Mekarjaya.

Raharja Desa Mekarjaya Cijaku Kembangkan Dua Unit Usaha Produktif

PELAKSANAAN Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharja Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku dinilai sangat baik dan berjalan meyakinkan. Kekompakan pengurus sesuai tujuan awal, patut menjadi contoh dan apresiasi bagi desa-desa lain.

Hal itu terlihat dari realisasi dua unit usaha produktif, yakni kolam budidaya Ikan Nila Merah di Kampung Pamundayan dan kebun pisang di Blok Cibacang.

Direktur BUMDes Raharja, Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya fokus bagaimana meningkatkan potensi desanya. “Kami fokus gimana caranya meningkatkan potensi desa, yaitu dengan mengelola BUMDes dengan baik. Semoga BUMDes yang saya pimpin bisa maju,” katanya, Selasa (8/9).

Sementara, Kepala Desa Mekarjaya, Wahyu mengatakan berharap agar pelaksanaan BUMDes sama-

kin nyata dan bermanfaat di masyarakat. “Saya berharap agar pelaksana BUMDes semakin nyata dan bermanfaat di masyarakat dan meningkatkan PADes desa,” kata Wahyu.

Ketua BPD Desa Mekarjaya, Aan Juanda, yang juga menjabat sebagai Pengawas BUMDes tersebut menambahkan pihaknya sebagai lembaga pengawas akan terus mendukung upaya positif program BUMDes.

“Kami sebagai BPD akan terus mengawasi dan mendukung agar BUMDes ini transparan, profesional, dan benar-benar menjadi milik masyarakat,” kata Aan.

Diketahui, dengan modal 196.550.000, dan berlandas moto ‘Bersama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan’, BUMDes Raharja kini BUMDes Raharja mulai menunjukkan hasil nyata. (WDO/RUS)

Dihubungi untuk Pergi Bekerja, Seorang Pria Didakwa Melakukan Aksi Curanmor

LEBAK, BANPOS - Seorang pria bernama Muhamad Soleh Pirdaus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung. Dalam persidangan itu dia didakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian jutaan rupiah.

Dalam persidangan yang beragenda pembacaan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lebak memberikan kronologi praktik lancung yang dilakukan terdakwa bersama rekannya berinisial A yang hingga kini masih berstatus buron (DPO).

Aksi pencurian tersebut bermula pada Selasa, 9 Juni 2026, sekira pukul 09.00 WIB. Saat itu, terdakwa dihubungi oleh Abidin melalui telepon genggam untuk diajak ‘bekerja’ alias mencuri. Tanpa pikir panjang, Soleh pun menyetujui ajakan tersebut.

“Sekira pukul 09.30 WIB, Abidin sampai di rumah terdakwa. Keduanya kemudian berangkat menuju Kecamatan Cimarga menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk mencari sasaran,” bunyi petikan dakwaan JPU yang dibacakan di persidangan.

Setibanya di Kampung Lebak Waru, Desa Cimarga, mata kedua pelaku tertuju pada satu unit motor Honda Beat warna hitam tahun

2022 dengan nomor polisi F 5696 FHI. Motor milik korban bernama Munir tersebut tengah terparkir di halaman rumah dalam kondisi lingkungan yang sepi.

Melihat ada kesempatan, terdakwa langsung turun dari motor dan menghampiri kendaraan sasaran. Berbekal kunci leter T yang sudah disiapkan, Soleh merusak rumah kunci motor tersebut dengan cepat.

Begitu mesin berhasil dinyalakan, motor curian itu langsung dibawa kabur menuju arah Kecamatan Muncang.

“Motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada penadah di Kampung Bengkok, Kecamatan Muncang, seharga Rp3,9 juta. Dari hasil penjualan itu, terdakwa men-

dapatkan bagian Rp2 juta, sementara sisanya dikantongi Abidin,” jelas JPU.

Akibat perbuatan nekat terdakwa, korban ditaksir mengalami kerugian materiil mencapai Rp7,5 juta. Aksi pencurian dengan pemberatan ini dinilai telah memenuhi unsur pidana karena dilakukan secara bersama-sama dengan merusak properti milik orang lain.

Atas perbuatannya, Muhamad Soleh Pirdaus dijerat dengan Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana. Terdakwa kini terancam hukuman penjara sebagai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukannya. (TQS/RUS)



Upaya pompanisasi persawahan agar produksi sawah tetap jalan, dan tidak mengalami gagal panen atau puso, Selasa (8/9)

Kekeringan, Sejumlah Petani di Wanasalam Terancam Puso

BAKSEL, BANPOS - Sejumlah petani di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam mengaku sawahnya terancam gagal panen akibat kekeringan. Disebutkan, sekitar 10 hektare sawah milik warga berpotensi merugi hingga ratusan juta rupiah, Selasa (8/9).

Salah seorang petani Wanasalam, Adang Abdi kepada BANPOS menyampaikan keluhannya terkait kondisi sawah yang mengering dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kekeringan yang melanda tidak sepenuhnya disebabkan oleh musim kemarau panjang. Ia menuding buruknya sistem pembagian air menjadi penyebab utama.

“Kekeringan ini bukan hanya karena kemarau panjang, tetapi juga karena saluran irigasi yang mengalir persawahan di Desa Cikeusik tidak berfungsi optimal,” ujar Adang.

Ia menyebut, permasalahan itu sudah berlangsung lama. Termasuk menyoroti kinerja petugas di pintu air.

“Selama ini petugas di pintu air tidak bekerja maksimal. Ya akibatnya pembagian air tidak merata. Kami meminta petugas bisa bekerja lebih optimal agar air bisa dibagi secara adil,” katanya.

Ditegaskan Adang, tidak ada alasan bagi sawah untuk kekeringan saat musim kemarau.

“Adanya irigasi itu untuk menjaga sawah tidak kekeringan saat kemarau. Jadi tidak bisa semua disalahkan ke cuaca,” ungkapnya.

Selanjutnya ia mendesak UPTD Pengelolaan DAS Ciliman - Cisawarna diminta bertanggung jawab penuh. Dan pimpinan UPTD menindak tegas pegawai di bawahnya yang lalai.

Dikatakan Adang, apabila tidak ada solusi dari pemerintah, para petani Desa Cikeusik berencana menggelar aksi demonstrasi.

“Kalau tidak ada solusi terkait masalah ini, kami akan demo. Bila perlu ganti kepala UPTD DAS Ciliman - Cisawarna,” katanya.

Kepala UPTD DAS Ciliman - Cisawarna, Kuncoro kepada BANPOS mengatakan, aliran air irigasi di beberapa aliran sungai tengah mengalami kekeringan.

“Faktanya hampir semua aliran

sungai kekeringan, sehingga irigasi juga kering, kalau pun masih ada di beberapa titik itu harus dibagi. Dan memang kita akan siapkan penjagaan oleh tim kami di pintu air agar tidak ada rebutan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya sudah mengendalikan semua hambatan pembagian air tersebut dan di beberapa titik telah diturunkan bantuan pompanisasi di persawahan Malingping dan Wanasalam.

“Jadi sampai hari ini kita masih terus berupaya agar sawah tetap produktif. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Dan terima kasih atas masukannya dari kelompok petani Cikeusik, Wanasalam,” ujar Kuncoro. (WDO/RUS)



Pasang Iklan DI SINI AJA...

Info Lebih Lanjut:
081334404392 / 087808831183

banposchannel
WEBSITE: www.banpos.co
EMAIL: banpospp@gmail.com
INSTAGRAM: banpos_pp
FACEBOOK: banpos_pp



Awal Musim yang Sengit

Ketatnya Persaingan Liga

JAKARTA, BANPOS - Musim kompetisi BRI Super League 2026/2027 baru saja bergulir dengan menyuguhkan rentetan drama sengit sejak pekan perdana. Pertarungan memperebutkan poin penuh antarklub bergengsi kasta tertinggi tanah air ini langsung berjalan dengan sangat kompetitif.

Penyerang Madura United Dimitar Mitkov menjadi bintang utama setelah sukses mencetak dwigol kemenangan berkelas ke gawang Persijap Jepara. Pemain berkebangsaan Bulgaria ini menegaskan dedikasinya untuk selalu memprioritaskan torehan ke-

menangan bersama rekan satu timnya. Ia menegaskan tidak terlalu ambisius mengejar target penghargaan individu.

“Sebagai striker, sangat penting untuk cetak gol, tapi yang paling penting adalah tim menang dan mendapatkan tiga poin,” kata Mitkov.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menanggapi positif kekalahan tim asuhannya pada laga perdana menghadapi tim tangguh Persija Jakarta. Ia menilai proses adaptasi anak asuhannya berjalan ke arah yang benar. Sang arsitek tim tetap memberikan apresiasi atas

perlawanan kuat yang disuguhkan skuad asuhannya tersebut.

“Namun dalam sepak bola saya tahu kalian hanya melihat hasilnya kami sebagai profesional di industri ini harus melihat performa tim,” ungkap Jeronimo.

Kubu Macan Kemayoran justru dilanda kelelahan fisik pascakemenangan dramatis mereka menumbangkan perlawanan tim tangguh asal Pulau Kalimantan. Juru taktik Persija Jakarta Shin Tae-yong membeberkan kondisi fisik memprihatinkan yang melanda skuadnya menjelang pertandingan penting. Perubahan jadwal imbas

abu vulkanik menjadi penyebab utamanya. “Terlalu capek. Ya, termasuk saya dan juga para pemain, semuanya merasa lelah,” ucap Shin Tae-yong tegas.

Sementara itu Jefri Wibowo menyukuri momen istimewanya meski gawangnya kebobolan sebanyak empat kali tanpa ada balasan sama sekali. Kiper tangguh Isenmulang FC tersebut tetap bangga atas pengalaman pertamanya bermain reguler di liga level teratas ini. Kesempatan emas tersebut merupakan impian besar keluarganya sejak dulu.

“Selanjutnya kita wujudkan im-

pian-impian berikutnya, bismillah. Coba lagi, lagi, dan lagi,” harap Jefri menyemangati dirinya sendiri.

Kubu Dewa United kini mengalihkan konsentrasi penuh usai mencuri tiga poin kemenangan dari markas besar tim Persik Kediri. Pemain sayap Carlos Lury meminta segenap rekannya tetap fokus mempersiapkan laga kandang melawan kesebelasan hebat Bhayangkara FC. Kesebelasan Dewa United diyakini mampu konsisten menjaga torehan tren kemenangan positif.

“Kini saatnya kami mengalihkan fokus penuh untuk laga berikutnya

menghadapi Bhayangkara FC,” ujar Lury semangat.

Persib Bandung membuat langkah strategis dengan resmi meminjamkan pemain sayap energiknya Saddil Ramdani menuju klub legendaris Persebaya Surabaya. Peminjaman taktis tersebut dirancang khusus guna menjamin ketersediaan jumlah menit bermain reguler sang punggawa tim nasional. Keputusan ini dinilai akan berbuah manis bagi masa depan karirnya.

“Setiap pemain memiliki perjalanan yang berbeda,” tutup Pelatih Persib Bandung Igor Tolich. (ANT/AZM)



Kepala Pelatih Ganda Campuran Utama Indonesia Nova Widianto.

PBSI Rombak Total Pasangan Ganda Campuran

JAKARTA, BANPOS - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia merombak susunan pemain sektor ganda campuran. Pelatih akan berikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka lewat berbagai turnamen. Evaluasi diterapkan guna melihat potensi racikan tim anyar tersebut.

Terdapat tiga pasang formasi baru yang baru diumumkan pengurus. Keputusan ini merupakan bagian program jangka panjang persiapan Road to Olympic 2028. Mereka akan diterjunkan pada serangkaian laga elit demi dinilai tingkat efektivitas pemainannya.

“Semua akan kami berikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka,” kata Kepala Pelatih Ganda Campuran Utama Indonesia Nova Widianto.

Duet pertama mempertemukan atlet Dejan Ferdinansyah dengan Felisha Alberta Nathaniel Pasariibu. Pasangan anyar tersebut dipastikan menjalani debut kompetisi pada Denmark Open 2026. Kejuaraan bulu tangkis itu siap bergulir mulai 13 hingga 18 Oktober.

Nova memastikan bahwa proses adaptasi seluruh atlet dipantau intensif. Staf pelatih butuh waktu khusus untuk menilai tingkat keserasian komunikasi lapangan. Konsistensi permainan beserta pola komunikasi menjadi indikator penilaian utama pelatih.

“Dari situ nanti akan kami evaluasi,” pungkas Nova.

Formasi kedua kini menyatukan

Bagas Maulana beserta atlet Apriyani Rahayu. Ganda campuran baru ini telah bertanding di turnamen Indonesia International Challenge 2026. Laga perdana pembuktian itu sukses digelar dari tanggal 25 hingga 30 Agustus.

Sebelumnya Dejan tercatat berpasangan rutin dengan Apriyani di berbagai turnamen. Felisha juga sebelumnya diketahui bertandem padu dengan pemain tangguh Jafar Hidayatullah. Perombakan taktis pelatnas murni ditujukan demi menemukan kerangka kekuatan tim.

“Sekarang kami sedang mencari format terbaik untuk sektor ganda campuran,” kata Nova.

Pasangan ketiga memasangkan M. Nawaf Khoiriyansyah dengan atlet Indah Cahya Sari Jamil. Duet ini dijadwalkan melakoni laga debut perdana pada ajang Malaysia Super 100 2026. Kejuaraan di wilayah negara tetangga tersebut berlangsung dari 13 sampai 18 Oktober.

Indah pada turnamen sebelumnya memang selalu bertandem dengan Bagas. Kebijakan pemisahan ini telah melalui tahap analisis pertimbangan kepelatihan yang sangat matang. Pihak pelatnas mengharapkan peningkatan kualitas permainan dari setiap punggawa barunya.

“Mudah-mudahan dari proses ini kami bisa mendapatkan format pasangan yang paling tepat dan kompetitif untuk ke depannya,” imbuh Nova. (ANT/AZM)

Klub Berbenah Hadapi Liga Basket

SOLO, BANPOS - Kesatria Bengawan Solo mulai berbenah secara serius dalam persiapan menghadapi Indonesian Basketball League 2027. Mereka baru menggelar rapat tahunan internal pada hari Selasa di Solo. Agenda ini membahas evaluasi perjalanan klub sekaligus menyusun rencana strategis menuju musim depan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Kesatria Bengawan Solo Yakub Hasibuan. Agenda konsolidasi ini juga dihadiri oleh pelatih kepala Anthony Garbelotto beserta jajaran staf. Beberapa pemain utama seperti Ponsianus Nyoman Indrawan, Avan Seputra, dan Indra Muhammad turut hadir.

“Mudah-mudahan bisa membawa hal-hal baik, terutama kemenangan dan juara bagi kota yang kami cintai ini, yaitu Kota Solo,” ujar Yakub.

Skuad berjukl Sang Kesatria ini terus meracik sejumlah gebrakan baru demi musim depan. Mereka kini merekrut Leonardo Niki Hartanto sebagai pimpinan General Manager. Pengalaman panjangnya mengelola tim profesional dinilai menjadi modal krusial untuk mendorong prestasi.

Leonardo sebelumnya memiliki rekam jejak panjang saat menangani klub Hangtuah Jakarta. Manajer andal ini pernah menjalani dua periode masa jabatan berbeda. Ia tercatat telah resmi meninggalkan posisinya di manajemen Hangtuah pada 23 Agustus 2026.

“Pengalaman dan visi kepemimpinan beliau diharapkan mampu membawa tim melangkah semakin solid, berprestasi, dan mencapai target terbaik musim 2027,” tulis manajemen Kesatria.

Dinamika persaingan liga juga diwarnai oleh kebijakan perombakan skuad Pelita Jaya Jakarta. Mereka resmi melepas sosok Aldy Izzatur Rachman setelah menjalin kebersamaan panjang. Pemain berusia 26 tahun ini dulunya diproyeksikan sebagai salah satu aset masa depan.

Aldy mengawali karier profesionalnya bersama Pelita Jaya pada kompetisi kalender 2023. Namun kesempatan bermain yang didapatkan penembak jitu tersebut perlahan semakin berkurang. Pada musim reguler lalu ia hanya sanggup menorehkan total tujuh kali penampilan.

“Ini adalah perjalanan yang hebat untuk memiliki anda (Aldy Izzatur Rachman) di sisi kami sel-

ma empat tahun terakhir, terima kasih untuk segalanya,” tulis manajemen.

Rata-rata menit bermain sang atlet bahkan tercatat terpuruk drastis di bawah enam menit per pertandingan. Catatan kelam tersebut menjadi rekor terendah bagi Aldy sepanjang jalannya karier. Manajemen sangat berharap agar perpisahan ini mampu membuka peluang baru bagi pemain.

Kembali pada dinamika Kesatria,

pimpinan baru diharapkan memberikan gagasan penyegaran. Leonardo ditugaskan meracik skuad proporsional sesuai kekuatan finansial tim. Hal ini krusial untuk benahi rekor klub yang terhenti prematur.

“Terima kasih untuk dukungan di musim 2026 dan sekarang kami sudah selesai rapat untuk persiapan musim 2027, jadi mohon kembali dukung kami,” pungkas Yakub. (ANT/AZM)



Aldila dan Erin Lolos Perempat Final

NEW YORK, BANPOS - Pasangan ganda putri Aldila/Erin tampil agresif sejak awal pertandingan tenis babak 16 besar. Mereka berhasil menekan permainan lawan secara konsisten di lapangan keras Amerika Serikat. Set pembuka sukses diamankan dengan torehan skor meyakinkan yakni 6-2.

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi dan pasangannya Erin Routliffe

harus menghadapi perlawanan sengit duet tangguh Eropa. Lawan mereka adalah pasangan Anna Bondar dan Anhelina Kalinina dari Hongaria serta Ukraina.

“Di set pertama kami sempat menang cukup mudah,” kata Aldila.

Perlawanan sengit mulai ditunjukkan oleh Bondar beserta Kalinina saat memasuki jalannya laga set kedua. Kedua pasangan terus

mempertahankan servis andalan masing-masing hingga kedudukanimbang 4-4. Momentum berpihak kepada kubu lawan setelah sukses merebut set laga 6-4.

Unggulan kesembilan ini segera bangkit mencari ritme permainan terbaik mereka pada fase set penentuan. Aldila dan Erin langsung memimpin kedudukan 4-0 usai sukses mematahkan servis lawan. Keunggulan mutlak tersebut sempat terpankas saat skor perlahan menjadi angka 2-4.

“Tetapi di set kedua, lawan bermain lebih baik,” ujar Aldila.

Pasangan lintas negara ini tidak membiarkan momentum kemenangan berharga terlepas kembali dari genggamannya. Keduanya sukses meneygel tiket delapan besar setelah merebut dua gim beruntun. Laga alot tersebut resmi berakhir usai memakan waktu hingga satu jam 57 menit.

Statistik pertandingan mencatat dominasi telak kubu Aldila jika dilihat dari keseluruhan perolehan angka poin. Mereka berhasil membukukan 92 poin yang berban-

ding 77 poin milik pasangan benua Eropa tersebut. Konversi empat dari enam peluang break point menjadi penentu kemenangan mutlak.

“Aku sangat senang akhirnya bisa membuahkan hasil,” ungkap Aldila bersyukur.

Prestasi menembus babak perempat final merupakan pencapaian tertinggi sang atlet pada ajang turnamen grand slam. Lawan berikutnya pada delapan besar adalah perwakilan ganda putri tuan rumah Amerika Serikat. Krueger dan Montgomery siap menjadi rintangan krusial pada hari Rabu.

Krueger dan Montgomery sebelumnya sukses menumbangkan perlawanan sengit dari duet ganda putri negara lain. Mereka mengalahkan Tatjana Maria dan Zeynep Sonmez melalui skor mutlak 6-3 serta 6-2. Laga perebutan tiket semifinal ini dipastikan berjalan amat menegangkan.

“Pastinya, masih banyak ruang untuk berkembang dalam permainan aku,” tandas Aldila. (ANT/AZM)



Belanja Modal Dipangkas, DPRD Soroti Arah APBD Perubahan

CILEGON, BANPOS - DPRD Kota Cilegon mempertanyakan arah belanja dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) 2026. Sorotan terutama ditujukan terhadap penurunan belanja modal sebesar 12,49 persen, sementara belanja pegawai serta barang dan jasa justru mengalami peningkatan. Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Golkar, Hidayatullah, mengatakan perubahan komposisi belanja perlu dijelaskan karena berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, Dalam RAPBD Perubahan 2026, total belanja daerah meningkat 4,08 persen atau sekitar Rp81,585 miliar. Namun, kenaikan tersebut lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi. “Belanja pegawai tercatat naik 4,12 persen atau sekitar Rp40,64 miliar. Sementara belanja barang dan jasa meningkat 9,17 persen atau sekitar Rp67,64 miliar,” ungkapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, belanja modal justru turun 12,49 persen atau sekitar Rp23,45 miliar. Padahal, belanja modal berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik dan investasi fisik jangka panjang. “Ketimpangan postur ini dinilai bertentangan dengan semangat peningkatan kualitas belanja dan



Paripurna DPRD Kota Cilegon dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9)

narasi percepatan pembangunan yang kerap digaungkan oleh Wali Kota,” kata Hidayatullah.

Selain struktur belanja, DPRD juga mempertanyakan kemampuan Pemkot Cilegon merealisasikan target pendapatan daerah. Hingga semester I 2026, realisasinya baru sekitar Rp20,511 miliar atau 9,94 persen dari target awal Rp206,383 miliar. “Fraksi-fraksi memper-

salah satu yang menjadi sorotan adalah target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BP-HTB). Dalam RAPBD Perubahan, target BPHTB dinaikkan menjadi Rp212,88 miliar. Sementara hingga semester I 2026, realisasinya baru sekitar Rp20,511 miliar atau 9,94 persen dari target awal Rp206,383 miliar. “Fraksi-fraksi memper-

berbasis kajian potensi riil dan data transaksi korektif dari kawasan industri yang melandasi optimisme administratif tersebut,” ujarnya.

Menanggapi pandangan DPRD, Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan seluruh catatan fraksi akan disampaikan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Menurut Fajar, kritik

terhadap realisasi anggaran maupun pelaksanaan program merupakan bagian dari proses evaluasi.

Setiap program yang telah direncanakan, kata dia, harus memiliki ukuran keberhasilan dan dilaksanakan sesuai perencanaan. “Kalau sudah direncanakan ya harus dilaksanakan. Apabila terjadi hambatan, itu juga harus ber-

dasarkan parameter dan tolok ukur yang jelas,” tutur Fajar.

Ia menegaskan, pelaksanaan APBD harus tetap mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Harus fokus ke RPJMD, karena teknokrasi dari situ, pembangunan lima tahun,” tegasnya. (CR-03/PAY)



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kota Cilegon, Heny Anita Susila.

Abu Vulkanik Mereda, Sekolah Kembali Tatap Muka

CILEGON, BANPOS - Kegiatan belajar mengajar di sekolah Kota Cilegon kembali digelar secara tatap muka mulai Rabu (9/9). Kebijakan tersebut diambil setelah kondisi cuaca dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) dinilai membaik. Meski pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dibuka, Pemerintah Kota Cilegon masih menerapkan sejumlah pembatasan untuk melindungi siswa dari paparan abu vulkanik. Siswa diwajibkan menggunakan masker dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar ruangan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kota Cilegon Heny Anita Susila mengatakan, pembukaan kembali PTM dilakukan atas instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon setelah kondisi cuaca membaik. “Sudah dibuka kembali karena kondisi cuaca sudah membaik. Kemarin dan hari ini kondisinya sudah membaik. Besok, atas instruksi Pak Sekda, sudah boleh tatap muka kembali,” kata Heny di lingkungan DPRD Kota Cilegon, Selasa (8/9).

Menurut Heny, sekolah diminta memperbanyak kegiatan di dalam ruangan selama kondisi abu vulkanik masih menjadi perhatian. Setelah kegiatan belajar selesai, siswa juga diminta langsung pulang ke rumah. “Dengan syarat anak-anak pakai masker, lebih banyak di dalam ruangan,

tidak ada aktivitas di luar ruangan. Setelah pulang sekolah, langsung ke rumah,” ujarnya.

Untuk memastikan penggunaan masker tetap berjalan, Dindik akan menginstruksikan sekolah menyediakan masker bagi siswa yang tidak membawanya dari rumah. “Untuk masker, belum sampai pada tahap mewajibkan bekal dari anak-anak. Kita upayakan instruksikan kepada kepala sekolah supaya bisa membagikan masker bagi anak yang tidak memiliki. Besok akan kita bagikan,” tutur Heny.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan seiring dengan dibukanya PTM. Aktivitas sekolah tetap diminta menyesuaikan kondisi lingkungan dengan mengutamakan keselamatan siswa.

Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz mengatakan, perubahan arah sebaran abu vulkanik menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam membuka kembali aktivitas sekolah. “Abu sudah mengarah ke barat laut jadi dihentikan, MBG juga normal lagi,” kata Aziz.

Meski sebaran abu secara kasatmata mulai berkurang, penggunaan masker tetap diberlakukan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kembali berubah. “Ya kalau penggunaan masker masih tetap. Walaupun asap sudah berkurang secara fisik, untuk antisipasi tetap menggunakan masker,” ujarnya. (CR-03/PAY)

BPBD Pastikan Titik Evakuasi Tsunami Sudah Disiapkan

CILEGON, BANPOS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon memastikan titik dan jalur evakuasi tsunami telah disiapkan di sejumlah wilayah rawan bencana. Kesiapan jalur tersebut juga rutin diuji melalui simulasi bersama perusahaan dan masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Cilegon Faturrohman mengatakan, titik evakuasi tsunami telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang. Titik tersebut mencakup lokasi evakuasi sementara dan titik evakuasi akhir. “Kalau titik evakuasi tsunami itu sebagaimana di Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata ruang. Kalau tidak salah, di Pasal 16 ayat 8, 9, 10, dan 11 itu ada titik-titik evakuasi, baik evakuasi sementara maupun akhir,” kata Faturrohman, Selasa (8/9).

Menurutnya, sejumlah jalur dan

titik evakuasi berada di kawasan Merak, Pulomerak, Ciwandan hingga Gerem. Beberapa di antaranya mengarah ke fasilitas pendidikan dan lokasi aman yang telah ditetapkan. “Kalau di Merak ada di SDN Pulorida, Kampung Tempusu. Kemudian di Ciwandan menuju akses perbatasan SDN 3 Gerem. Kalau di Merak itu di Langan,” ujarnya.

Faturrohman mengatakan, keberadaan titik dan jalur evakuasi terus disosialisasikan kepada masyarakat. Jalur tersebut juga telah dilengkapi rambu-rambu untuk membantu warga menuju lokasi aman ketika terjadi keadaan darurat.

“Titik-titik evakuasi sebetulnya sudah disampaikan ke masyarakat setiap ada pertemuan. Bahkan tahun 2023, kalau tidak salah, sudah dibuat jalur-jalurnya dengan ditandai rambu-rambu evakuasi,” tuturnya.

Selain sosialisasi, BPBD secara rutin melakukan simulasi untuk menguji kesiapan jalur evakuasi. Simulasi

melibatkan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri serta unsur masyarakat. “Di Zona 1 Ciwandan sering melakukan simulasi dengan Chandra Asri, kemudian Sahimass dan teman-temannya. Rutin setiap tahun melakukan simulasi uji jalur,” katanya.

Hal serupa dilakukan di kawasan Merak. Sejumlah perusahaan dilibatkan untuk menyusuri jalur evakuasi hingga menuju titik aman yang telah ditentukan. “Mulai dari perusahaan-perusahaan di Merak, ada Lotte, Tofe, MCCI, itu disusuri jalur simulasi sampai titik aman. Di Gerem kita ke SD Sumur Wuluh,” ujar Faturrohman.

Di sisi lain, BPBD Cilegon juga tengah mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK). Faturrohman mengatakan, partikel abu vulkanik mulai terlihat di hampir seluruh wilayah Kota Cilegon, meski ketebalannya berbeda-beda. “Sebetulnya kalau

di Cilegon hampir merata semua kecamatan. Partikel abu vulkanik mulai terlihat di Kota Cilegon. Semua Cilegon itu sama, tinggal ketebalan debunya,” tandasnya.

Untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik, BPBD bersama pihak terkait melakukan pendistribusian masker dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Warga juga diminta menggunakan masker dan pelindung kepala ketika beraktivitas di luar rumah. Faturrohman mengimbau masyarakat tidak menyapu abu vulkanik dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel kembali beterbangan.

Abu yang menempel di lingkungan rumah sebaiknya dibasahi terlebih dahulu sebelum dibersihkan. “Kalau ada abu di teras rumah, sebaiknya disiram dengan air, jangan disapu kering. Nanti debunya berterbangan karena mengandung silika, bahan pembuat kaca,” tutupnya. (CR-03/PAY)

Cilegon Perkuat Koordinasi Hadapi Dampak Abu Vulkanik GAK

CILEGON, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memperkuat koordinasi lintas daerah dan menyiapkan layanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) yang memengaruhi kualitas udara di wilayah Banten. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan bersama Forkopimda Kota Cilegon, Forkopimda Kabupaten Serang, TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penanganan apabila kondisi aktivitas GAK mengalami peningkatan.

Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, mitigasi perlu dilakukan sejak dini tanpa menunggu kondisi memburuk. Menurutnya, koordinasi antarinstansi menjadi penting untuk memastikan setiap perkembangan dapat segera direspon. “Bencana potensinya ada di depan mata kita. Kita siapkan segala bentuk serta langkah, agar ketika sesuatu yang tidak diharapkan kita bisa lebih mitigasi,” kata Robinsar usai Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Mitigasi Tanggap Bencana di Jalan Jenderal Sudirman, depan Mapolres Cilegon, Selasa (8/9).

Selain koordinasi penanganan bencana, Pemkot Cilegon mem-



Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Erupsi GAK, Selasa (8/9)

perkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik. Tim kesehatan dan puskesmas disiagakan untuk menangani warga yang mengalami gangguan pernapasan maupun keluhan kesehatan lainnya. “Alhamdulillah kalau korban jiwa di Kota Cilegon masih minim, kita hara-

apkan tidak terjadi. Tapi tim kami dari kesehatan terus turun, dari puskesmas juga ikut pula ketika ada masyarakat yang mungkin gangguan pernapasan dan lain-lain kita selalu hadir,” ujarnya.

Robinsar menambahkan, kesiapan komunikasi dengan masyarakat juga menjadi bagian pen-

ting dalam mitigasi. Informasi terkait perkembangan kondisi GAK harus disampaikan secara tepat untuk mencegah kepanikan dan beredarnya informasi yang tidak benar.

“Sosialisasi masyarakat perlu disiapkan ketika evakuasi, komunikasi dengan stakeholder terkait, TNI-Polri, serta unsur pemerintahan agar mengasosiasikan langkah-langkah dan meredam isu-isu yang tidak benar,” katanya.

Menurut Robinsar, penanganan dampak aktivitas GAK membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena dampaknya tidak mengenal batas administratif. Karena itu, Pemkot Cilegon terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk menyamakan langkah penanganan. Pemantauan kondisi GAK juga akan terus dilakukan.

Langkah penanganan akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas gunung dan dampaknya terhadap masyarakat Cilegon. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kita terus pantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait,” tandasnya. (CR-03/PAY)



PJJ DI KOTA SERANG. Seorang siswa SD mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui aplikasi daring di Komplek Depag, Kota Serang, Selasa (8/9). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mengalihkan sementara kegiatan pembelajaran bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR) karena terdampak abu vulkanik akibat Gunung Anak Krakatau erupsi.



Belum Sah Cerai, Pengadilan Temukan Praktek 'Poliandri'

SERANG, BANPOS - Pengadilan Agama (PA) Serang mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap putusnya hubungan secara fisik sebagai berakhirnya status perkawinan. Pasalnya, masih ditemukan perempuan yang menikah kembali secara siri, sementara perkawinan sebelumnya belum diputus secara resmi oleh pengadilan. Hakim PA Serang, Fathullah

Hakim, mengatakan persoalan tersebut dapat menimbulkan status perkawinan yang bermasalah secara hukum. Menurut dia, perceraian harus terlebih dahulu diproses melalui Pengadilan Agama sebelum seseorang melangsungkan perkawinan berikutnya. "Menikah yang kedua tapi buku pertamanya nggak BACA BELUM HAL-8

Backlog Rumah Tembus 500 Ribu Gubernur Desak Kepastian LSD

SERANG, BANPOS - Kebutuhan hunian di Provinsi Banten masih menjadi pekerjaan rumah besar. Gubernur Banten Andra Soni menyebut bahwa backlog perumahan di Banten mencapai sekitar 380 ribu hingga 500 ribu keluarga. Menurut Andra, tingginya backlog tersebut tidak terlepas dari posisi Banten sebagai wilayah urban sekaligus daerah tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap rumah terus meningkat. "Jumlah backlog kita atau masyarakat kita yang belum memiliki rumah masih sangat tinggi, karena

memang wilayah kita adalah wilayah urban dan wilayah pencari kerja, sehingga kurang lebih sekitar 380 sekian ribu sampai dengan 500.000 backlog kita," kata Andra, Selasa (8/9). Andra menjelaskan, backlog perumahan tersebut terbagi dalam dua kategori. Pertama, masyarakat atau keluarga yang sama sekali belum memiliki rumah. Kedua, keluarga yang telah memiliki rumah, tetapi kondisi rumahnya tidak layak. Persoalan tersebut, kata Andra, menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu ditangani pemerintah bersama para pemangku kepen-

tingan di sektor perumahan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan pengembang untuk memenuhi kebutuhan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, upaya memenuhi kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan kepastian ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman. Karena itu, Andra berharap pemerintah segera mengambil keputusan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). "Ini menjadi PR kita bersama, sehingga kami berharap kepada pe-

merintah untuk segera memutuskan kaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)," ujarnya. Menurut Andra, kepastian mengenai LSD menjadi penting bagi Banten karena wilayah ini merupakan salah satu kawasan penyangga ibu kota yang terus berkembang sebagai wilayah permukiman. Selain mendorong adanya kepastian lahan, Andra mengatakan Pemprov Banten dan Apersi sepakat memperkuat sinergi untuk menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman yang semakin baik. BACA GUBERNUR HAL-8

Dindikbud Pastikan KBM Daring Tetap Berjalan

SERANG, BANPOS - Erupsi Anak Krakatau tidak menyurutkan semangat dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memastikan KBM tetap berjalan maksimal. Inspeksi mendadak langsung dilakukan menuju berbagai sekolah pada hari Selasa. Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri meninjau langsung pelaksanaan belajar daring tersebut. Dia menyoroti lokasi SDN 2 beserta kawasan SMPN 3 pada penin-

jauan siang harinya. Sidak ini digelar guna menjamin efektivitas sistem digital bagi seluruh murid. "Kita ingin pastikan bahwa proses KBM daring atau PJJ ini berjalan efektif," tandas Nuri. Kebijakan jarak jauh tersebut wajib dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh semua pendidik. Sekolah dilarang keras cuma menyuguhkan tugas tanpa interaksi komunikasi dua arah. Krisis ini justru dinilai sebagai momentum baik

pemutakhiran sistem digital. Evaluasi akan rutin digulirkan secara berkala kepada semua tingkatan satuan unit pendidikan. Pengukuran efektivitas program ini menyoroti tingkat usia dini hingga merambah jenjang menengah. Pihak dinas pun bersyukur mendapatkan tingkat kehadiran tenaga guru sukses seratus persen. "Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada guru-guru yang terus melaksanakan kewajiban-

nya," ungkap Nuri. Kementerian pendidikan nasional kini menanti arahan krusial dari seluruh pimpinan daerah. Hasil kajian tim satuan kesehatan sangat menentukan durasi pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring. Plt Kepala SMPN 3 Kota Serang Edi Ruspandi membenarkan opsi pemanfaatan media percakapan daring. Manajemen sekolah sangat BACA DINDIKBUD HAL-8

Gandeng Konten Kreator Perkuat Literasi Digital

SERANG, BANPOS - Pemprov Banten menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ruang informasi publik yang sehat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama Influencer Content Creator Network (ICN) Banten dalam menggelar workshop peningkatan literasi digital dan gerakan anti-hoaks, Selasa (8/9). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Beni Ismail mengatakan, tantangan masyarakat saat ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan berlimpahnya informasi yang belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. "Media sosial menjadi ajang bagi

masyarakat untuk mencari dan memberikan informasi. Persoalannya, apakah informasi itu benar dan dapat dipercaya," kata Beni. Menurut dia, pemerintah daerah bersama para pengelola media digital perlu mengubah paradigma dalam memproduksi konten. Informasi yang disampaikan pemerintah tidak cukup hanya sekedar dipublikasikan, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, mudah ditemukan, dapat dipercaya, dan layak dibagikan kembali. Beni juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan konten kreator dan masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi keliru, termasuk ketika terjadi situasi bencana. "Jangan lagi berpikir yang pen-



ting posting. Kita harus berpikir apa manfaat informasi yang kita berikan kepada masyarakat," ujarnya. Komisioner KPID Banten Bidang Kelembagaan Talitha Almira me-

ngatakan, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat memiliki akses yang semakin luas untuk memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut BACA GANDENG HAL-8

LEBIH MUDAH
AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

BP BANPOS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON Google Play

PORTAL BERITA
E- PAPER
YouTube Channel

banpos channel www.banpos.co bantenpos@gmail.com banten_pos banten pos

Belum Sah...

Sambungan dari Halaman 7

minta persoalan poliandri tidak hanya dilihat dari sisi moral dan kemudian berujung pada penghakiman terhadap perempuan.

Menurut Faridhotul, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang luas. Tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan status anak, harta kekayaan, kewarisan hingga administrasi kependudukan.

Ia menilai masyarakat perlu memahami bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia memiliki prinsip dan mekanisme yang jelas. Poligami pun bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan harus ditempuh melalui prosedur hukum yang telah ditentukan.

Sementara untuk poliandri, Faridhotul menyebut hukum positif Indonesia tidak menyediakan mekanisme bagi seorang perempuan untuk memiliki lebih dari satu suami dalam waktu bersamaan.

Namun, ia mengingatkan agar dugaan poliandri tidak langsung disamakan dengan tindak pidana. Penilaian hukum harus didasarkan pada fakta konkret dan unsur perkara yang dapat dibuktikan.

"Artinya, fenomena poliandri harus dibedah berdasarkan fakta dan konstruksi hukumnya, bukan sekadar label," kata Faridhotul kepada BANPOS, Selasa (8/9).

Faridhotul menilai ada sejumlah hal yang harus diperiksa ketika muncul dugaan poliandri, mulai dari status perkawinan pertama, keberadaan perkawinan

kedua, pencatatan perkawinan hingga fakta-fakta lain yang berkaitan dengan perkara.

Menurutnya, hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan asumsi maupun tekanan publik. Setiap pihak tetap harus memperoleh perlakuan yang objektif sesuai fakta dan ketentuan hukum.

Persoalan tersebut, lanjut Faridhotul, juga tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak. Konflik perkawinan orang tua berpotensi berdampak terhadap pengasuhan, nafkah, administrasi kependudukan, harta maupun hak waris anak.

"Perempuan tidak boleh diposisikan sebagai objek penghukuman sosial. Tetapi perempuan juga tidak boleh diposisikan sebagai subjek yang kebal dari hukum. Dua hal tersebut harus berjalan bersamaan," ujarnya.

Karena itu, ia mendorong penguatan literasi hukum perkawinan di masyarakat, terutama bagi perempuan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dinilai penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan yang justru menimbulkan persoalan hukum baru.

"Pada akhirnya, persoalan poliandri bukan hanya tentang 'perempuan boleh atau tidak boleh memiliki lebih dari satu suami'. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana kita membangun masyarakat yang mampu membedakan antara hak personal, norma sosial, hukum perkawinan, tindak pidana, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak," tandasnya.(MYU/AZM)

SERANG



Berdayakan Kelompok Wanita

Cegah Kekerasan Dalam Keluarga

SERANG, BANPOS - Organisasi wanita memiliki peran amat vital tentang program penguatan inklusif cegah KDRT bagi masyarakat. Gabungan organisasi kaum ibu ini diyakini mampu menekan potensi ancaman tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi ketahanan mental keluarga harus terus disosialisasikan secara berkelanjutan dan merata.

Bupati Serang Ratu

Rachmatuzakiyah secara resmi melantik jajaran Pengurus Gabungan Organisasi Wanita periode 2026-2031. Prosesi pengukuhan jajaran pengurus baru tersebut berlangsung di Gedung KORPRI Kabupaten Serang hari Selasa. Pimpinan daerah menaruh harapan besar terhadap tingkat dedikasi jajaran pengurus.

"Kalau GOW aktif, berperan aktif, saya yakin kita dapat minim resiko adanya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual pada anak," ungkap Zakiyah.

Wadah pergerakan ini telah sukses menghimpun delapan belas kelompok organisasi wanita di wilayah tersebut. Mereka dituntut agar senantiasa terjun langsung membina segenap lapisan masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan hidup kaum hawa menjadi target pencapaian yang paling utama.

Pemerintah juga menugaskan kelompok perempuan ini guna menjalankan agenda strategis ketahanan pangan di tingkat daerah.

Gerakan menanam ragam jenis komoditas hortikultura di pekarangan rumah dinilai sangat menguntungkan. Inovasi mendaur ulang limbah sampah domestik turut bernilai ekonomis tinggi.

"Yang pasti programnya berkaitan dengan perempuan dan anak," ujar Ketua GOW Kabupaten Serang Siti Maryam.

Sebanyak dua puluh enam pengurus inti kini telah resmi mengemban tanggung jawab mulia ini. Mereka akan segera menggelar agenda rapat kerja teknis demi merumuskan arah program tahunan. Perencanaan cetak biru kegiatan lima tahun ke depan juga ikut dibahas secara tuntas.

Pengurus dituntut bekerja ekstra guna memastikan visi lembaga selalu selaras bersama program prioritas daerah. Anggaran operasional kegiatan lembaga saat ini bersumber dari kucuran dana dinas perlindungan anak. Dana iuran keanggotaan turut membantu menutupi keterbatasan dukungan kas pemerintah.

"Biar bagaimana perempuan nanti ke depan bisa produktif, terutama memang untuk bisa mengakomodir semua organisasi yang ada di GOW," ucap Maryam.

Kolaborasi erat mutlak dibangun bersama pelbagai dinas terkait demi mencapai tujuan program. Sinergi itu harus melibatkan pihak perindustrian maupun satuan kerja tenaga kerja lokal. Penguatan sektor literasi keuangan warga diharapkan segera terealisasi melalui kemitraan.

Pergerakan aktif kaum perempuan diyakini sanggup memaksimalkan taraf kemajuan pembangunan infrastruktur daerah. Angka krisis stunting balita diproyeksikan bakal merosot drastis melalui intervensi lembaga pergerakan ibu. Masa depan kesejahteraan warga kabupaten dan kota, yang mungkin saat ini sedang kita tunggu nih terkait masalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Berkelanjutan/LPS.

Mudah-mudahan sudah bisa diputuskan beberapa waktu ke depan," kata Anto.(MPD/AZM)



Kota Serang Dukung Kebijakan Pusat

Soal Pengalihan Guru PPPK

RENCANA kebijakan Pengalihan Guru PPPK oleh pemerintah pusat mendapat dukungan penuh pimpinan wilayah. Pemerintah Kota Serang menyambut amat baik wacana rasionalisasi kepegawaian bagi para tenaga pendidik. Aturan ini dipercaya memberi dampak sangat positif bagi stabilitas keuangan daerah masa depan.

Beban pembiayaan rutin gaji aparatur negara selama ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengalihan tanggung jawab menuju kementerian pusat dipastikan sanggup menyelamatkan sisa kas pemerintah daerah. Pimpinan daerah mengapresiasi wacana terobosan rancangan kebijakan dari perwakilan pusat tersebut.

"Ya saya alhamdulillah, berarti bebannya bukan di Pemerintah Kota Serang lagi," ucap Walikota Serang Budi Rustandi.

Berkurangnya tanggungan operasional guru tersebut diyakini membuka ruang fiskal baru bagi kepentingan pemerintah kota. Budi merasa sangat optimistis anggaran



sisa tersebut kelak bisa segera dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik. Kualitas pelayanan umum kepada seluruh elemen warga Serang dipastikan terus ditingkatkan secara maksimal.

Pemimpin kawasan tersebut tak luput menyampaikan segenap harapan krusialnya mengenai skema alokasi pendanaan dari pusat. Pihak Pemkot sangat berharap perpindahan tanggung jawab penggajian pegawai kelak tidak memotong jatah reguler daerah. Dana Alokasi Umum yang diterima amat diharapkan untuk tetap ditransfer secara

utuh dan berkelanjutan.

"Ya, itu mengurangi beban daripada Pemerintah Kota Serang," kata Budi menambahkan ulasan ringkas perihal dampak wacana kebijakan tersebut.

Kesiapan esensial masa transisi birokrasi ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Murni. Figur pimpinan andalan tersebut memastikan pihaknya tengah mengejar cepat proses sinkronisasi pangkalan data para pekerja. Ribuan guru PPPK penuh waktu serta tenaga kontrak paruh waktu dipastikan tercatat secara aman.

Proses sinkronisasi mutakhir ini turut serta melibatkan pihak dinas pendidikan dan pengelola keuangan daerah setempat secara proaktif. Profesi tenaga pengajar memang selalu mendominasi porsi jumlah total pegawai roda pemerintahan daerah selama bertahun-tahun. Pengecekan silang rutin antar instansi terbukti cukup ampuh dalam menjamin akurasi pangkalan data birokrasi.

"Yang pasti peralihan ini akan segera dilaksanakan, hanya kita masih menunggu mekanisme peralihannya seperti apa," ungkap Murni. (ADV)

Gubernur Desak...

Sambungan dari Halaman 7

"Dan kami tadi sama-sama bersepakat untuk saling bersinergi, saling mendukung, serta bersama-sama membuat iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten semakin baik ke depan," kata Andra.

Ketua DPD Apersi Banten Anto Disanto mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Gubernur Banten untuk memba-

has sinergi dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Anto berharap sinergi tersebut dapat diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu kepastian terkait LSD dan lahan berkelanjutan yang dinilai berkaitan dengan pengembangan perumahan di Banten.

"Sebelumnya, kami dari DPD Apersi Banten sudah diterima oleh

Pak Gubernur terkait dengan sinergi kita di dalam pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bersinergi lagi di tingkat kabupaten dan kota, yang mungkin saat ini sedang kita tunggu nih terkait masalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Berkelanjutan/LPS. Mudah-mudahan sudah bisa diputuskan beberapa waktu ke depan," kata Anto.(MPD/AZM)

Dindikbud Pastikan...

Sambungan dari Halaman 7

mengandalkan fasilitas perpustakaan virtual guna memastikan presensi harian siswa. Segala bentuk kendala teknis lapangan mulai teratasi sempurna karena peserta didik semakin terbiasa. Persentase partisipasi harian kelas ini selalu dipantau ekstra ketat oleh tiap tenaga pengajar.

"Alhamdulillah respons anak-

anak sudah biasa, mungkin karena digital sudah biasa," tandas Edi.

Penerapan skema serupa ternyata diaplikasikan maksimal oleh instansi lingkungan sekolah dasar. Kepala SDN 2 Kota Serang Salmi mengonfirmasi bahwa keseluruhan jumlah pengajarnya tetap hadir bertugas. Mereka konsisten memulai rutinitas pemantauan harian tersebut secara serentak sejak pagi harinya.

Gandeng Konten...

Sambungan dari Halaman 7

perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai regulasi dan tanggung jawab dalam membuat konten.

"Konten kreator sekarang mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami mana informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang berpotensi menyesatkan masyarakat," kata Talitha.

Talitha menjelaskan, pengawasan terhadap konten media sosial dan konten kreator saat ini belum sepenuhnya berada dalam cakupan kewenangan KPI berdasarkan Un-

dang-Undang Penyiaran 2002. Pengaturan terhadap konten digital seperti user generated content (UGC) dan layanan over the top (OTT) tengah menjadi bagian dari pembahasan revisi regulasi penyiaran.

Panitia penyelenggara, Intan Imelda, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang lebih sehat melalui kolaborasi berbagai pihak, khususnya pemerintah, mahasiswa, dan konten kreator.

"Kami ingin kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi bisa melahirkan kolaborasi dan gerakan bersama untuk melawan hoaks," ujar Intan.

Menurut Intan, keterlibatan konten kreator menjadi penting karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat sekaligus kemampuan menjangkau audiens secara luas melalui berbagai platform digital. Kolaborasi antara pemerintah dan ekosistem kreator digital dinilai menjadi salah satu kunci menghadirkan ruang informasi publik yang lebih sehat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Dengan kolaborasi tersebut, pesan edukasi mengenai literasi digital diharapkan dapat disampaikan secara lebih kreatif dan mudah diterima masyarakat," tandasnya.(MPD/AZM)



Aktivitas GAK...

Sambungan dari Halaman 1

sektor pariwisata.

Aktivitas perdagangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, mengalami penurunan drastis menyusul aktivitas erupsi GAK. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan harga jual ikan, serta merosotnya pendapatan harian para pedagang pasar.

Suasana pelelangan ikan pada Selasa pagi terlihat jauh lebih sepi, dibandingkan hari normal akibat berkurangnya pasokan tangkapan nelayan. Situasi keamanan vulkanik disinyalir memengaruhi minat kunjungan pembeli ke lokasi pelelangan secara signifikan.

Pedagang ikan setempat, Piah mengatakan, penurunan pembeli

61 SPPG...

Sambungan dari Halaman 1

257.681 sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang terdampak penghentian sementara pendistribusian makanan bergizi menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK)

Terkait puluhan SPPG yang disuspend, kondisi fasilitas SPPG juga disebut mempengaruhi pemberian sanksi tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Provinsi Banten, Asep Royani.

“Di Provinsi Banten itu memang ada sekitar 61 SPPG yang terkena suspend itu juga karena permasalahannya berbeda-beda mulai dari fasilitas sampai dengan administrasi. Itu juga melatar belakangi suspend,” katanya.

Di samping itu Asep juga menyampaikan bahwasannya SPPG di Provinsi Banten belum 100 persen dilengkapi dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. “Kalau untuk 100 persen mungkin belum karena masing-masing SPPG juga kebetulan operasionalisasinya berbeda-beda tidak serentak artinya masing-masingSPPG juga punya tahapan atau punya proses yang berbeda,” ujarnya.

Meski disebutkan belum 100 persen SPPG di Provinsi Banten belum memiliki SLHS, namun dirinya belum bisa memberikan data pasti berapa unit dapur yang belum dilengkapi dengan persyaratan administrasi tersebut. Sebab, pihaknya belum memperbarui data mengenai hal itu. “Saya belum bisa laporkan lagi karena belum kami update lagi. Jadi mungkin informasi SLHS akan kami sampaikan atau akan kami berikan informasi-nya di kemudian hari,” terangnya.

Semua persoalan itu, kata Asep, akan menjadi perhatian pihaknya dalam menjaga mutu program Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya BGN memberikan tenggat waktu satu bulan kepada pengelola SPPG untuk segera membenahi seluruh kekurangan yang dialami. “Minimal satu bulan setelah operasional itu harus sudah ada pengurusan baik itu pelatihan penyedia makanan, IKL (inspeksi kesehatan lingkungan), uji sampel dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.

Sementara, sebanyak 257.681 sasaran Program MBG di Kota Serang terdampak penghentian sementara pendistribusian makanan bergizi menyusul erupsi GAK. Jumlah tersebut terdiri dari peserta didik serta kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyu-

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

Aksi Kamisan bukan sekadar kegiatan rutin yang berulang setiap pekan. Ia adalah cara sederhana untuk merawat ingatan ketika waktu terus berjalan dan berbagai peristiwa perlahan kehilangan tempat dalam ingatan publik. Di balik pakaian hitam dan payung yang terbuka, ada pertanyaan yang terus dipertahankan: di mana keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia? Siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan negara benar-benar menyelesaikan persoalan yang telah bertahun-tahun diwariskan?

Bagi sebagian orang, aksi semacam ini mungkin terlihat monoton. Berdiri, diam, membawa poster, kemudian pulang. Namun justru dalam kesunyian itu terdapat pesan yang kuat. Diam bukan berarti lupa. Berulang bukan berarti kehilangan makna.

Aksi Kamisan mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan nama dalam buku. Ada manusia yang kehilangan keluarga, masa depan, bahkan kehidupan. Ada pula keluarga yang harus hidup bersama ketidakpastian dan pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban.

dicipu rasa takut masyarakat terhadap situasi erupsi gunung berapi. Keadaan ini diakuinya membuat para pedagang mengalami kerugian akibat sepi nya transaksi jual beli. “Harga ikan anjlok dan pembeli sepi lantaran takut dengan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini, sehingga kami berharap kondisi segera kembali normal seperti semula,” kata Piah kepada wartawan, Selasa (8/9).

Piah menyebut, harga jual ikan mengalami penurunan signifikan dari kisaran normal akibat sepi nya pembeli di pasar. Harga komoditas ikan yang biasanya dijual Rp80 ribu hingga Rp85 ribu, kini turun menjadi Rp70 ribu per kilogram.

Hal senada disampaikan pedagang ikan lainnya, Amnah mengaku, lesunya transaksi perdagangan

sui (busui), dan balita non-PAUD.

Penghentian sementara dilakukan karena sejumlah SPPG turut terdampak abu vulkanik. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kontaminasi pada proses penyediaan maupun distribusi makanan.

Koordinator Wilayah BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dapat berdampak pada keamanan makanan.

“257.681 terdiri dari siswa dan 3B. Kebijakan BGN tidak ada pendistribusian MBG, baik untuk siswa maupun 3B, karena mengingat kondisi di SPPG juga terdampak abu vulkanik. Kami tidak mau adanya kontaminasi silang,” ujar Nuni saat dihubungi BANPOS, Selasa (8/9).

Menurutnya, kebijakan penghentian sementara tersebut tidak hanya berlaku di Kota Serang, tetapi diterapkan di tiga wilayah yang terdampak, yakni Banten, Lampung, dan DKI Jakarta.

“Jadi BGN membuat kebijakan tiga wilayah itu, Banten, Lampung dan DKI Jakarta, untuk SPPG-nya berhenti sementara,” katanya.

Dengan penghentian operasional SPPG tersebut, Nuni menegaskan tidak ada pendistribusian makanan bergizi secara langsung ke rumah-rumah penerima manfaat. Pemenuhan kebutuhan makanan bergizi untuk sementara dikembalikan kepada masing-masing orang tua di rumah. “Jadi tidak ada juga untuk pemberian makanan ke setiap rumah. Kebutuhan makanan bergizinya dikembalikan kepada orang tua di rumah,” jelasnya.

Nuni menambahkan, seluruh SPPG di Kota Serang mengikuti arahan BGN terkait penghentian sementara operasional. Dengan demikian, mekanisme pembagian makanan secara langsung atau *door to door* juga tidak dilakukan.

“Kita SPPG mengikuti arahan pimpinan, semuanya *off* operasional. Jadi tidak ada juga door to door ke rumah memberikan makanan bergizi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penghentian sementara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keamanan pangan, mengingat sejumlah wilayah terdampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Kalau untuk lebih jelasnya mengenai target gizi, ini kan karena bencana ya, SPPG juga terdampak abu vulkanik. Jadi ini juga untuk kesehatan, makanya SPPG-nya diberhentikan sementara,” tuturnya.^(CR02/TQS/ENK)

Yang lebih menyedihkan, ketika pelanggaran kembali terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana mengingat luka masa lalu. Setiap pelanggaran baru menambah satu lagi catatan hitam dalam perjalanan bangsa. Seolah-olah sejarah yang seharusnya menjadi pelajaran justru kembali ditulis dengan tinta yang sama. Karena itu, merawat Aksi Kamisan sejatinya adalah merawat ingatan. Bukan untuk terus hidup dalam dendam, melainkan agar keadilan tidak dikalahkan oleh waktu dan pelanggaran tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Sebab ketika sebuah bangsa berhenti mengingat, ia berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Dan ketika pelanggaran dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh, ia hanya menunggu untuk ditambah oleh luka berikutnya. Ingatan menjadi bentuk perlawanan paling sederhana terhadap lupa. Selama masih ada orang yang berdiri setiap Kamis, cerita tentang mereka yang menuntut keadilan belum benar-benar selesai. Dan selama masih ada pelanggaran yang terjadi, catatan hitam itu belum berhenti bertambah.

Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan!*

sangat memukul perekonomian para pelaku usaha kecil di sekitar pesisir. Penurunan jumlah pembeli membuat stok ikan tangkapan nelayan sulit terjual habis.

“Aktivitas pelelangan ikan mengalami penurunan, menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada harga ikan anjlok serta mempengaruhi pendapatan para pedagang,” kata Aminah.

Lesunya aktivitas perdagangan di pelelangan ikan diprediksi masih akan terus berlangsung hingga situasi vulkanik dinyatakan benar-benar aman. Para pedagang mengharapkan pemulihan ekonomi segera terjadi seiring meredanya aktivitas letusan gunung.

Pada bagina lain, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah-raga (Disparpora) Kota Serang,

Rombongan Jurnalis...

Sambungan dari Halaman 1

diterima tim SAR pada Selasa (8/9) dan langsung ditindaklanjuti dengan pencarian. Hingga Selasa sore, ketujuh orang tersebut belum ditemukan.

Direktur Polairud Polda Banten, Kombes Pol Eko Hartanto dalam laporan awalnya menyebutkan, kapal yang membawa para jurnalis bertolak dari Dermaga Pagedang, Carita, sekitar pukul 14.00 WIB, Senin (7/9). Komunikasi terakhir salah seorang korban dengan jurnalis Lampung bernama Abay terjadi sekitar pukul 14.42 WIB. Saat itu, korban mengirimkan lokasi terakhir. Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, komunikasi dengan rombongan tersebut terputus.

“Adapun tujuh orang yang sementara terdada berada dalam kapal tersebut yakni M. Bagus Khoirunnas, jurnalis Antara. Ari Basuki, jurnalis Merdeka. Yudhis, jurnalis iNews. Daus, jurnalis Anadolu. Donal, jurnalis freelance. Sementara dua orang lainnya yang masih dalam proses pendataan,” papar Eko dalam laporannya.

Berdasarkan laporan Ditpolairud Polda Banten, lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan kapal berada di perairan Selat Sunda pada koordinat 6°14’40.52”S 105°40’49.48”T. Jarak dari RIB 02 BTN menuju lokasi pencarian diperkirakan 9,98 nautical mile (NM), dengan waktu tempuh sekitar 40 menit.

Tim Rescue USS Pandeglang sebelumnya telah mendaratangi Dermaga Pagedang untuk menggali informasi. Dari keterangan yang diperoleh, kapal *speedboat* milik kepala desa setempat berangkat dari dermaga pada Senin sekitar pukul 14.00 WIB dan hingga laporan dibuat belum kembali. Pemilik kapal juga disebut belum memperoleh informasi mengenai keberadaan kapal tersebut.

Pencarian kemudian dilakukan dengan melibatkan 23 personel gabungan. Mereka terdiri dari dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten dan 16 personel Basarnas Banten. Basarnas mengerahkan kapal KN Tetuka untuk mendukung operasi pencarian. Kapal tersebut

Dampak El-Nino...

Sambungan dari Halaman 1

Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Banten per 2 September 2026 tercatat kerusakan tanaman padi akibat kekeringan selama Musim Tanam 2026 telah mencapai 2.839,75 hektare, tersebar di 67 kecamatan dan 181 desa/ke-lurahan di empat kabupaten dan satu kota.

Hal yang paling mengkhawatirkan dalam data tersebut yakni seluas 636,75 hektare lahan pertanian dinyatakan puso, tanaman mati total tanpa harapan panen.

Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saiful Bahri, mengungkapkan El Nino diprediksi BMKG masih akan berlanjut hingga Oktober 2026. Dampaknya tidak hanya pada tanaman yang sudah ada di lapangan, tetapi juga memukul jadwal musim tanam

PJJ GAK..

Sambungan dari Halaman 1

membuat aktivitas pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Banten harus dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bagi sebagian orang tua, situasi tersebut tentu bukan pengalaman baru.

Bagi Anisah, ibu Gia, PJJ kali ini justru menghadirkan rasa yang sedikit berbeda. Bukan hanya soal mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga karena suasana tersebut mengingatkannya pada masa pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

“Jadi keingat zaman Covid,” ujar

Zeka Bachdi, mengatakan seluruh fasilitas pariwisata di Kota Serang masih beroperasi seperti biasa. Pemerintah daerah belum mengambil kebijakan untuk menutup destinasi maupun fasilitas wisata.

“Untuk pariwisata sendiri kita tidak menutup. Tentu kita menghimbau kepada semua pelaku wisata yang ada di Kota Serang untuk menggunakan masker dan kacamata,” kata Zeka saat dihubungi BANPOS, Selasa (8/9).

Menurutnya, imbauan tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak aktivitas vulkanik GAK. Pemerintah juga mengarahkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak melakukan kegiatan di dalam ruangan.

“Instruksi dari Pak Wali juga tidak menutup fasilitas, hanya

bertolak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju perairan Carita-Anyer pada Selasa (8/9) sore.

Operasi pencarian berlangsung di tengah kondisi perairan Selat Sunda yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dalam laporan tersebut disebutkan jarakpandang di sekitar lokasi mencapai sekitar satu mil. Sementara kondisi cuaca dilaporkan cerah berawan, dengan angin bergerak dari selatan ke utara berkecepatan 16,7 knot dan tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter.

Sementara itu, Kepala Basarnas Banten, Al Amrad mengatakan bahwa hingga saat ini, pencarian masih belum membuahkan hasil. Pihaknya akan melakukan pencarian lebih luas esok hari sembari mempelajari rute pencarian.

“Pencarian masih nihil. Besok kami akan memperluas area pencarian dan mempelajari rute dari Carita menuju Gunung Anak Krakatau,” singkatnya.

Hingga laporan awal pencarian diterbitkan, seluruh korban masih berstatus dalam pencarian. Tim gabungan terus melakukan penyisiran untuk menemukan keberadaan kapal beserta seluruh penumpangnya.

Mitigasi dan Kualitas Udara

Pada bagian lain, Pemerintah Kota Cilegon mulai memperkuat mitigasi dan layanan kesehatan menyusul dampak abu vulkanik GAK yang telah memengaruhi kualitas udara di wilayah Banten. Langkah tersebut dikoordinasikan bersama Forkopimda Kota Cilegon, Forkopimda Kabupaten Serang, TNI dan Polri.

Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, potensi dampak erupsi GAK perlu diantisipasi sejak dini dengan menyiapkan langkah penanganan apabila kondisi berkembang. Pemerintah, kata dia, tidak ingin menunggu hingga situasi memburuk baru mengambil tindakan.

“Bencana potensinya ada di depan mata kita. Kita siapkan segala bentuk serta langkah, agar ketika sesuatu yang tidak diharapkan kita bisa lebih mitigasi,” kata Robinsar usai Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Mitigasi Tanggap Bencana di Jalan Jenderal Sudirman, depan Mapolres Cilegon, Selasa

Berikutnya.

“Kita BMKG ada penambahan El Nino sampai bulan Oktober. Pasti mereka masa tanamnya akan mundur, pasti ke triwulan satu yaitu periode Oktober-Maret. Biasanya kita kenal dengan tiga musim tanam, tahun ini dua kali,” kata Saiful, Selasa (8/9).

Dari lima wilayah terdampak, Kabupaten Serang menjadi episentrum kekeringan dengan 1.016 hektare rusak, 336 hektare di antaranya puso. Disusul Kabupaten Pandeglang 867,5 hektare dengan 300 hektare masih terancam, Kabupaten Tangerang 572,25 hektare dengan 264,75 hektare puso, Kabupaten Lebak 344 hektare, dan Kota Serang 40 hektare.

Dari total kerusakan, 1.008 hektare masuk kategori ringan, 534 hektare sedang, dan 662 hektare berat. Sementara 492 hektare ber-

berikutnya.

Ingatan Anisah seolah kembali ke sekitar 2020-2021. Ketika itu, putri sulungnya yang merupakan kakak perempuan Gia juga harus menjalani pembelajaran secara daring. Bedanya, sang kakak kala itu masih duduk di bangku SMA. Kini, beberapa tahun berselang, situasi serupa kembali hadir di rumahnya. Hanya saja, yang berada di depan layar telepon genggam kini adalah Gia, anaknya yang masih duduk di kelas IV SD.

Anisah pun kembali menjalani peran yang pernah dilakukannya beberapa tahun lalu, memastikan

mengimbau kepada masyarakat untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam ruangan dan menggunakan masker serta kacamata untuk aktivitas di luar ruangan,” ujarnya.

Zeka menyebut, hingga saat ini belum terlihat adanya penurunan jumlah kunjungan wisata maupun okupansi hotel akibat erupsi GAK. Namun, pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap jumlah pengunjung, khususnya pada akhir pekan yang menjadi waktu ramai aktivitas wisata. “Kalau untuk Gunung Anak Krakatau sendiri pas erupsi tidak ada penurunan. Standar masih datanya. Tidak ada penurunan,” jelasnya.

Ia mengatakan, data kunjungan wisata pada Jumat hingga Minggu mendaratng akan menjadi salah satu indikator untuk melihat

(8/9).

Menurut Robinsar, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan komunikasi antarinstansi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi GAK dapat disampaikan secara tepat kepada masyarakat, termasuk apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi.

“Sosialisasi masyarakat perlu disiapkan ketika evakuasi, komunikasi dengan stakeholder terkait, TNI-Polri, serta unsur pemerintahan agar mengasosiasikan langkah-langkah dan meredam isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara, berdasarkan pemantauan instansi terkait, kualitas udara di sejumlah wilayah di Provinsi Banten terpantau dalam kualitas sedang. Seperti yang terlihat di Kota Rangkasbitung, Indeks standar pencemaran udara (ISPU) di wilayah tersebut menunjukkan hasil kualitas udara sedang.

Penilaian itu diperoleh berdasarkan hasil uji Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap kualitas udara di Kabupaten Lebak pasca erupsi GAK empat hari yang lalu. Adapun parameter pengujian yang digunakan dalam penentuan kualitas udara di Kabupaten Lebak adalah *Particulate Matter* (PM) 2.5 yang berarti debu halus. Dalam pengujian itu diperoleh skor hasil 84 pada parameter tersebut dengan status sedang.

Selain PM 2.5, ada enam parameter lain yang digunakan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Lebak. Parameter itu di antaranya PM10 skor hasil 49, Sulfur Dioksida (SO2) skor hasil 10. Lalu Nitrogen Dioksida (NO2) skor hasil 20, Karbon Dioksida (CO2) skor hasil 14, Oksidan (O3) skor hasil 25. Semua parameter tersebut memiliki status yang sama yakni dalam kondisi baik.

Dalam pengujian itu juga DLH menggunakan parameter lain guna menilai kualitas udara di Kabupaten Lebak. Parameter itu yakni, *Total Suspended Particulate* atau TSP. Parameter tersebut memiliki skor hasil 194,8 yang artinya kualitas udara di Kabupaten Lebak memenuhi baku mutu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak,

hasil pulih, 1.151 hektare sudah dipanen lebih awal, dan 312 hektare masih berstatus terancam.

Kecamatan Jawilan dan Kopo di Kabupaten Serang menjadi titik terparah. Bantuan benih sudah mulai disalurkan ke dua kecamatan tersebut untuk mengantisipasi kondisi puso yang berpotensi terus meluas jika hujan tidak segera turun.

Hasil monitoring Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan di lapangan mengidentifikasi empat penyebab utama kekeringan yang melanda persawahan Banten, tidak ada hujan dalam beberapa hari hingga minggu, tidak ada sumber air karena sebagian merupakan sawah tadah hujan, sumber air yang ada sudah mulai mengering, dan sumber air tersedia namun letaknya terlalu jauh sehingga menyulitkan pompanisasi.

Menghadapi ancaman El Nino anak mengikuti pembelajaran dari rumah, memperhatikan materi yang disampaikan guru, sekaligus menemani aktivitas belajar agar tetap berjalan. PJJ akibat erupsi GAK memang bukan pandemi. Namun, bagi Anisah, melihat anak belajar melalui layar kembali menghadirkan potongan kenangan tentang masa ketika sekolah dan rumah seolah menyatu dalam satu ruang pembelajaran.

Jika dahulu PJJ menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan di tengah pandemi, kali ini pembelajaran dari rumah dilakukan menyusul kondisi Gunung Anak Krakatau

apakah terdapat dampak terhadap sektor pariwisata atau tidak. Sementara itu, tingkat okupansi hotel di Kota Serang juga disebut masih berada dalam kondisi normal, baik dari sisi ketersediaan kamar maupun pemesanan. “Okupansi hotel juga masih normal seperti sebelum-sebelumnya di Kota Serang. Enggak ada masalah,” ungkap Zeka.

Zeka menegaskan, sejauh pemantauan sementara, dampak erupsi GAK terhadap sektor pariwisata Kota Serang belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan para pelaku wisata melalui kelompok sadar wisata dan kelompok kampung wisata. “Kita sudah ada grupnya, ada juga datanya dan kita sudah komunikasikan semua,” tuturnya.^(CR02/DHE/ENK)

(8/9).

Menurut Robinsar, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan komunikasi antarinstansi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi GAK dapat disampaikan secara tepat kepada masyarakat, termasuk apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi.

“Sosialisasi masyarakat perlu disiapkan ketika evakuasi, komunikasi dengan stakeholder terkait, TNI-Polri, serta unsur pemerintahan agar mengasosiasikan langkah-langkah dan meredam isu-isu yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara, berdasarkan pemantauan instansi terkait, kualitas udara di sejumlah wilayah di Provinsi Banten terpantau dalam kualitas sedang. Seperti yang terlihat di Kota Rangkasbitung, Indeks standar pencemaran udara (ISPU) di wilayah tersebut menunjukkan hasil kualitas udara sedang.

Penilaian itu diperoleh berdasarkan hasil uji Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, menyebut, indeks kualitas udara sebelumnya sempat mencapai angka 89,67. Meski masih masuk kategori sedang, angka tersebut sudah mendekati kondisi tidak sehat.

Keadaan sedang, dalam artian kemarin kita hampir mendekati 90, yaitu 89,67. Dan itu mendekati hampir tidak sehat meskipun masih sedang,” kata Farach.

Namun, Farach mengungkapkan bahwa kondisi saat ini mulai membaik. Berdasarkan pemantauan DLH, indeks kualitas udara saat ini berada di kisaran 44.

“Untuk saat ini nilainya sekitar 44. Itu menunjukkan ada penurunan, khususnya pada parameter yang tinggi saat ini adalah partikulat molekul 2,5 (PM2.5) dan ozon,” ujarnya.^(CR03/TQS/MYU/ENK)

yang diprediksi berlanjut hingga Oktober, Dinas Pertanian Provinsi Banten menyiapkan enam langkah mitigasi untuk menekan kerusakan yang lebih luas. sa;lah satunya menganjurkan petani menanam benih varietas yang toleran terhadap kekeringan.

Dilain sisi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, lip Makmur, meminta dinas teknis baik itu Distan maupun DPUPR Banten untuk bergerak melakukan mitigasi dampak El Nino berkepanjangan ini.

Selain mitigasi, Komisi II juga meminta pemerintah memastikan perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian, terutama bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

“Harus dipastikan asuransi pertanian berjalan bagi petani yang gagal panen. Jangan sampai petani kelaparan,” tegasnya.^(MPD)

yang sedang mengalami erupsi. Ada satu hal yang mungkin berubah, yaitu anaknya. Dulu, sang kakak yang duduk di bangku SMA. Sekarang, giliran Gia yang masih ber-seragam SD—meski untuk sementara seragam itu tak perlu dikenakan karena kelas berpindah ke rumah.

Bagi Gia, mungkin PJJ hanya berarti belajar dari rumah sambil melihat layar telepon genggam. Tetapi bagi Anisah, pagi itu terasa seperti membuka kembali album lama, sebuah nostalgia zaman Covid yang datang tanpa diundang, kali ini karena erupsi Gunung Anak Krakatau.^(ENK)



Tangkapan virtual Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana dalam Diskusi Publik "Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Strategis via Danantara & MBG" yang diadakan INDEF secara virtual di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bappenas Sebut Regulasi-Kelembagaan jadi Hambatan Pertumbuhan RI

JAKARTA, BANPOS - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menyatakan regulasi dan kelembagaan menjadi hambatan utama yang perlu dibenahi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi menuju negara maju.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan hal tersebut mengacu pada kajian growth diagnostic yang dilakukan Bappenas bersama Harvard University untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Hambatan yang paling mengikat di Indonesia bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi regulasi dan kelembagaan," ujarnya dalam konferensi bersama Bappenas dan Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut dia, pembenahan regulasi dan kelembagaan penting karena visi pembangunan dan strategi yang jelas saja belum cukup untuk membawa Indonesia mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Untuk itu, Eka menyebut pemerintah perlu memastikan adanya kerangka regulasi dan kelembagaan yang konsisten, disertai dukungan pendanaan dan investasi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan menuju negara maju.

Ia menambahkan pembenahan kelembagaan menjadi pen-

ting untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Apalagi, Indonesia saat ini memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui visi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Eka menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu berada pada kisaran 6-7 persen untuk keluar dari jebakan pendapatan negara kelas menengah.

Untuk mencapai sasaran itu, Bappenas telah menetapkan empat tahap transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045.

Pada tahap pertama 2025-2029, transformasi diarahkan pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6,1 persen.

Selanjutnya, pada 2030-2034, pemerintah menargetkan penguatan kompleksitas produk industri dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9-7,8 persen.

Pada tahap 2035-2039, transformasi diarahkan pada penguatan daya saing industri menuju ekspansi global, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4-7,6 persen.

Sementara itu, pada 2040-2045, Indonesia diarahkan menjadi pusat manufaktur bagi pasar dunia, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,7 persen.(ANT/RUS)

EKONOMI

MENAG BERHARAP PEMBANGUNAN EKONOMI WUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

JAKARTA, BANPOS - Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Nasaruddin Umar mengatakan pembangunan ekonomi harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Pembangunan ekonomi tentu bukan sekedar pertumbuhan angka, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan dan mewujudkan keadilan sosial. Inilah nanti akan memberikan berkah," kata Menag Nasaruddin dalam pembukaan Simposium IAEI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Menag, perpaduan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah bagaimana ilmu, nilai dan kebijakan dapat dipertemukan untuk mengelola amanah pembangunan.

Ia mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap menunjukkan resiliensi dan mampu tumbuh di tengah dinamika

global, dengan pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II tahun 2026.

"Hanya saja, capaian ini harus terus dievaluasi sejauh mana pertumbuhan mampu memperluas

kesempatan kerja dan mereduksi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan," kata Nasaruddin.

Ia menilai bahwa bangsa Indonesia perlu menanggapi ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global dengan rasa syukur yang di-

wujudkan melalui kesadaran bahwa kemajuan adalah amanah untuk kemaslahatan publik.

"Namun, ada sorotan atas tantangan pembangunan riil, bahwa konsentrasi ekonomi masih berpusat di Jawa yang menyumbang 57,24 persen perekonomian nasional," ujar dia.

Menag Nasaruddin menilai ketimpangan yang masih ada di tengah pertumbuhan ekonomi perlu menjadi sebuah "panggilan moral" konstitusional Indonesia.

Pendekatan ekonomi Islam, lanjut dia, juga menjadi relevan, mengingat posisinya yang turut memperhatikan beberapa aspek seperti kepedulian akan kelompok rentan dan lingkungan.

"Bagaimana mengambil kepemilikan pribadi dan keuntungan, namun membatasinya dengan keadilan, kepedulian pada kelompok rentan, pelestarian lingkungan, serta kesedaran bahwa harta adalah amanah," kata Menag Nasaruddin.

"Maka penting untuk mengintegrasikan self-interest, social interest dan ecological interest," ujarnya menambahkan.(ANT/RUS)



Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Nasaruddin Umar, dalam jumpa pers pembukaan Simposium IAEI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Komisi XII Minta SKK Migas Jelaskan Kenaikan "Cost Recovery" 2027

JAKARTA, BANPOS - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan kenaikan pengembalian biaya operasi (cost recovery) migas pada 2027.

Mekeng menilai kenaikan "cost recovery" perlu disertai penjelasan mengenai dampaknya terhadap peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi nasional.

"Cost recovery kita dari tahun ke tahun meningkat. Tapi lifting kita bukannya meningkat, malah menurun. SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini," kata Mekeng dalam keterangan di Jakarta, Selasa (8/9).

Ia menilai pembahasan "cost recovery" tidak hanya berkaitan

dengan aspek teknis industri hulu migas, tetapi juga menyangkut penerimaan negara sehingga penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini uang rakyat," ujarnya.

Pemerintah dan Komisi XII DPR RI telah menyepakati cost recovery dalam asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral RAPBN 2027 sebesar 10,1 miliar dolar AS.

Angka tersebut meningkat dibandingkan target "cost recovery" 2026 sebesar 8,5 miliar dolar AS.

"Kalau anggaran sebesar itu dikeluarkan, tetapi kita tetap menghadapi masalah lifting yang turun, tentu pertanyaannya adalah, sebenarnya uang itu digunakan untuk apa dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi?" kata Mekeng.

Ia meminta SKK Migas mema-

parkan struktur "cost recovery" secara rinci, termasuk komponen biaya, mekanisme penentuan kelayakan biaya, serta ukuran yang digunakan dalam menilai pengeluaran tersebut.

"Harus diurai apa saja komponen dari 'cost recovery'. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan bahwa biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?" ujarnya.

Mekeng mengatakan keterbukaan diperlukan agar DPR dan masyarakat dapat mengetahui efektivitas biaya operasi yang dikembalikan dalam kegiatan usaha hulu migas tersebut.

Komisi XII, lanjut dia, akan meminta penjelasan lebih lanjut dari SKK Migas mengenai efektivitas dan akuntabilitas "cost recovery".

"Kami akan adakan lanjutan. Ka-

lau memang tidak bisa ditemukan penjelasan yang meyakinkan, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas agar semua itu bisa terbuka dengan baik," katanya.

Dalam asumsi RAPBN 2027, pemerintah dan Komisi XII DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi sebesar 612.500 barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 954.000 barel setara minyak per hari.

Target lifting minyak tersebut meningkat dibandingkan proyeksi 2026, sedangkan target lifting gas mengalami penyesuaian turun.

SKK Migas sebelumnya memproyeksikan "cost recovery" 2027 berada pada kisaran 10,1 miliar dolar AS hingga 11,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan proyeksi 2026 sebesar 8,5 miliar dolar AS hingga 9,9 miliar dolar AS.(ANT/RUS)

Magang Nasional Diklaim Tingkatkan Produktivitas

Pacu Target Ekonomi

JAKARTA, BANPOS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Magang Nasional (MagangHub) merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memacu target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

"Tahun 2026 diperkirakan (pertumbuhan ekonomi) dalam kisaran 5,6 persen menuju 6 persen di tahun 2027," kata Menko Airlangga di Jakarta, Selasa (8/9).

"Terkait produktivitas dari tenaga kerja, pemerintah meluncurkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi, yang jumlahnya di tahun ini 150 ribu," ujarnya menambahkan.

Senada dengan program Magang Nasional, Menko mengatakan pemerintah juga mendorong pro-

duktivitas nasional melalui program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 200 ribu peserta tahun ini.

Ia menambahkan, kedua program strategis tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan antara angkatan kerja muda baru dengan kebutuhan industri.

"Nah ini tentu sebuah angka yang besar, di mana dengan adanya pelatihan vokasi maupun magang selama enam bulan, diharapkan generasi muda ini yang baru lulus bisa link and match dengan kalangan industrinya," ujar Menko Airlangga. Sementara itu, pendaftaran peserta Magang Nasional Tahun 2026 Tahap II resmi ditutup per 8 September.

Adapun setelah tahap pendaftaran, seleksi peserta akan berlangsung pada 9-15 September

2026, dengan hasil seleksi diumumkan pada 18 September 2026.

Lebih lanjut, peserta terpilih dijadwalkan mulai mengikuti program magang pada 21 September 2026.

Magang Nasional 2026 Tahap II merupakan bagian dari target 150 ribu peserta program tahun ini, dengan kuota sebanyak 50 ribu peserta pada setiap angkatan.

Di sisi lain, Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 5 telah dibuka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara daring melalui platform Skillhub hingga 16 September 2026. Peserta yang lolos seleksi awal wajib mengikuti tahapan wawancara pada 17-23 September 2026.

Selanjutnya, pengumuman peserta yang lolos Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 5 akan dilakukan pada 24 September 2026.(ANT/RUS)



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

LEBIH MUDAH

AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

DOWNLOAD SEKARANG

APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON Google Play

BANTEN POS

PORTAL BERITA

E- PAPER

YouTube Channel



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

Dinkes Jamin Ketersediaan Masker

Untuk Dibagikan ke Warga

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, saat ini telah mengambil langkah intervensi dalam menjamin ketersediaan masker untuk kebutuhan masyarakat di tengah ancaman sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi di Tangerang, Selasa (8/9) mengatakan bahwa sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kepanikan dan mengatasi potensi kelangkaan masker di pasaran, pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait telah mendistribusikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat.

"Intervensi ini diprioritaskan bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan agar terlindungi dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau," katanya.

Ia bilang, pemerintah daerah melakukan pendistribusian melalui pembagaaian masker gratis untuk memastikan stok logistik kesehatan tetap aman dan mencukupi kebutuhan warga terdampak.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying dalam memborong masker di tengah potensi paparan abu vulkanik.

"Kita sudah menyampaikan imbauan, ada edaran juga dari Pak Bupati, dari Kemenkes juga ada. Kita sampaikan memang harus kita laksanakan untuk menjaga kesehatan karena butir-butir abu vulkanik itu memang berbahaya," paparnya.

Dalam hal ini, masyarakat diminta tetap waspada dan mengikuti arahan resmi pemerintah. Langkah pencegahan dinilai penting mengingat partikel bu-

tir-butir abu vulkanik berisiko buruk bagi kesehatan saluran pernapasan.

Selain itu, Dinkes Kabupaten Tangerang terus mengingatkan warga yang beraktivitas di luar rumah agar disiplin mengenakan masker sebagai pelindung diri.

"Warga juga diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi dan edaran resmi dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, ketersediaan masker di toko hingga pasaran di Kabupaten Tangerang, Banten semat mengalami kelangkaan pasca meningkatnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Salah seorang pengecer masker di wilayah Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rini mengatakan, permintaan masker mulai meningkat sejak Minggu (6/9). "Ramainya itu pas sore, setelah ramai imbauan pakai masker," katanya.

Menurut dia, sebagian besar pembeli datang untuk membeli masker dalam jumlah banyak. Namun, ia terpaksa membatasi pembelian maksimal tiga hingga empat masker per orang agar stok yang tersisa dapat dibagikan kepada pembeli lainnya.

"Rata-rata mereka mintanya per boks. Tapi saya cuma kasih satuan aja, paling 3 sampai 4 masker karena stok saya juga sedikit," ujarnya.

Rini mengaku belum menambah persediaan karena harga masker di sejumlah toko daring mengalami kenaikan. Ia mengatakan, harga yang sebelumnya sekitar Rp17 ribu per boks kini mencapai Rp25 ribu.

"Saya pesannya dari toko yang ada di Shopee, stoknya juga sudah enggak ada, sekiranya ada juga harganya mahal banget. Biasanya satu boks itu Rp17 ribu, sekarang naik jadi Rp25 ribu, gimana saya mau jualnya," kata dia. (ANT/RUS)

SACHRUDIN SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS HADAPI BENCANA

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi berbagai potensi bencana akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK), musim kemarau dan potensi kekeringan, hingga dampak perubahan iklim.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Selasa (8/9) mengatakan terkait sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau pihaknya mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah.

"Jangan banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka kecuali mendesak dan penting. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi murid sekolah untuk melindungi siswa," ujar Sachrudin dalam keterangannya.

Sementara itu untuk antisipasi dampak kemarau jangka panjang, lanjut dia, perlu dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) guna solusi jangka panjang seperti normalisasi.

"Kalau benar terjadi, kemarau ini hingga awal tahun depan sesuai informasi awal BPBD dan Kali Cisadane jadi kering, maka perlu kita antisipasi melalui normalisasi guna menjaga ketersediaan air bersih," ujarnya.

Sachrudin juga menegaskan semakin cepat potensi risiko dikenali, semakin besar peluang pemerintah mengurangi dampaknya. Karena itu koordinasi antara jajaran wilayah, perangkat daerah dan instansi



Walikota Tangerang, Sachrudin (tengah) didampingi Wakil Walikota Maryono (kanan) dan Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman (kiri) dalam rapat kewilayahan di Puspemkot Tangerang.

terkait harus diperkuat agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat serta tepat.

"Semua pihak diminta tidak menunggu hingga kejadian terjadi untuk bertindak," ujarnya.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meminta camat dan lurah tidak ragu mengambil tindakan terhadap persoalan di masyarakat yang berpotensi memicu bencana maupun mengganggu ketertiban.

Ia mencontohkan kebakaran tim-

bunan sampah dari TPS liar sebagai persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, sekaligus momentum bagi jajaran untuk lebih tegas dalam melakukan pencegahan.

"Kejadian terbakarnya timbunan sampah dari TPS liar harusnya menjadikan kita tidak ragu bertindak tegas sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jangan takut, apalagi merasa tidak enak berhadapan dengan oknum, sekalipun tokoh tertentu. Lakukan

dialog, koordinasi, dan tunjukkan kepemimpinan di situ," pesan Maryono.

Menurut Maryono, kepemimpinan di tingkat wilayah bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga memastikan potensi masalah dapat dicegah sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

"Yang kita jaga bukan hanya ketertiban, tetapi keselamatan masyarakat," ujarnya. (ANT/RUS)

Tangsel Wajibkan Sekolah Cek Kehadiran Pelajar di PJJ

TANGERANG SELATAN, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan satuan pendidikan memantau pelaksanaan pembelajaran serta kehadiran pendidik dan peserta didik selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangsel Deden Deni di Tangerang, Selasa (8/9) mengatakan kebijakan PJJ diberlakukan sebagai langkah kesiapsiagaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik

di tengah potensi paparan abu vulkanik.

"Pelaksanaan PJJ ini merupakan langkah kesiapsiagaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik, sekaligus memastikan hak anak atas layanan pendidikan tetap terpenuhi," kata Deden.

Deden menjelaskan pelaksanaan PJJ tidak berarti kegiatan pembelajaran dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti proses belajar dengan memanfaatkan ekosistem digital yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan.

Kepala satuan pendidikan diminta memastikan kegiatan PJJ tetap bermakna, aktif, dan terarah, dengan memanfaatkan berbagai platform pembelajaran, seperti Learning Management System (LMS), Google Classroom, maupun media daring resmi sekolah.

"Sekolah tetap harus memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik selama PJJ, sehingga perubahan metode belajar ini tidak mengurangi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan," kata Deden.

Pihaknya terus berkoordinasi

dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel.

Koordinasi dilakukan untuk memperoleh pertimbangan teknis terkait perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), termasuk arah sebaran abu vulkanik yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

"Perkembangan kondisi kualitas udara dan arah sebaran abu vulkanik terus kami pantau bersama instansi terkait. Kebijakan pembelajaran berikutnya akan menyesuaikan

dengan kondisi dan hasil pemantauan di lapangan," jelasnya.

Deden juga mengimbau orang tua atau wali murid agar aktif mendampingi anak selama mengikuti PJJ dari rumah. Pendampingan mencakup pengawasan dan bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung.

"Pemkot Tangsel bersama perangkat daerah terkait akan terus memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan kualitas udara sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya."

katanya.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi pemerintah.

"Saya memahami bahwa kabar mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tentu menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi kita semua. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada," ujar Benyamin. (ANT/RUS)

Pemetaan Wilayah Penyemprotan Disiapkan Pekerja

Kurangi Abu Vulkanik GAK

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan melakukan pemetaan wilayah yang menjadi sasaran penyemprotan badan jalan menggunakan metode dust suppression yakni mengendalikan debu, termasuk pada area proyek dan pertambangan untuk membantu

mengurangi abu vulkanik

"Kami menggunakan metode tersebut untuk membantu mengurangi abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang menumpuk di badan jalan," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan dalam keterangannya di Tangerang, Selasa (8/9).

Pilar mengatakan pada tahap awal, penyemprotan sudah dilak-

ukan pada Selasa (8/9) dini hari mulai pukul 01.00 WIB dengan sasaran meliputi Terminal BSD-Jalan Ciater Raya-Bundaran Marugapi Gunung Anak Krakatau (GAK), kemudian ruas Pamulang Square-Sesak dan sebaliknya, serta kawasan Stasiun Rawa Buntu-Melati Mas dan sebaliknya.

Kegiatan dilaksanakan bersama tim gabungan antara lain Dinas Pemasdam Kebakaran dan Penyelamatan,

BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK). Penanganan juga didukung Polres Tangerang Selatan, Kodim 0506 Tangerang, serta pihak pengembang.

Menurutnya, penyemprotan dilaksanakan pada malam hingga dini hari dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

"Kami lakukan pada malam sampai dini hari agar proses penanganannya lebih optimal dan tidak terlalu mengganggu mobilitas warga. Harapannya, sebelum aktivitas masyarakat kembali ramai pada pagi hari, endapan abu di ruas jalan sudah bisa kita kendalikan," katanya.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah melakukan rapat evaluasi bersama perangkat daerah terkait un-

tuk menentukan langkah penangan dampak sebaran abu vulkanik.

Penyemprotan jalan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengendalikan debu dan mengurangi potensi abu kembali beterbangan akibat aktivitas kendaraan maupun angin.

"Selama tiga hari sejak ke depan kita review beberapa koridor jalan untuk dilakukan penyemprotan," katanya. (ANT/RUS)

JATUH TEMPO BAYAR PBB-P2

30 SEPTEMBER 2026

*Hindari sanksi administrasi 1% setiap bulan jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

Terima kasih telah menjadi bagian dari pembangunan Kota Tangerang dengan membayar PBB-P2 tepat waktu

#TangerangAyo

#berSAMAmbangunKota

bagian.dari.pembangunan.kota.tangerang